

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP)
KOTA BANDA ACEH**

2022



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
INSPEKTORAT

Jln. Prof. Ali Hasyimi Lr. Geuchik Daud Gampong Pango Raya
Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh
Telp (0651) 8057123, Fax (0651) 8057123

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kota Banda Aceh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan ini.

Banda Aceh, Maret 2023
Inspektorat Kota Banda Aceh
Inspektur,


RITASARI PUJIASTUTI, AP
Pembina Utama Muda
Nip. 19760407 199503 2 001

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan kinerja strategis yang dituangkan didalam dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Kota sebagai perencanaan pembangunan menengah dan perencanaan kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu perbaikan kinerja yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKjIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban instansi pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja kedepan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kota Banda Aceh tahun 2022 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan dokumen perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

Kinerja Pemerintah Daerah Kota Banda Aceh diukur berdasarkan penilaian terhadap indikator kinerja sasaran strategis yang disusun sebagai mana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022. Penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target kinerja menjadi tolok ukur dari keberhasilan pembangunan di Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh dari hasil analisis isu-isu strategis menghasilkan 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran strategis atau Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator-indikator ini ditetapkan pada setiap Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023-2026. Ikhtisar capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori capaian
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh	Indeks	85	79,85	93,94	Baik
Rata-Rata Capaian Sasaran 1			93,94		Baik	
Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	%	80	83,21	104,06	Sangat Baik
Rata-Rata Capaian Sasaran 2			104,06		Sangat Baik	
Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Jiwa	18,263	19,900	91,04	Baik
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,68	8,62	48,24	Kurang
	Persentase	%	100	59,36	59,36	Cukup

	Peningkatan Nilai investasi					
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 3		66,21				Cukup
Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	Indeks	0,90	0,81	90	Baik
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 4		90				Baik
Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90	89,16	99,07	Baik
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 5		99,07				Baik
Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	Indeks	63,40	71,00	112	Sangat Baik
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 6		112				Sangat Baik
Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	Indeks pembangunan Gender (IPG)	%	97,1	95,54	98,39	Baik
	Persentase Indikator Kota Layak anak yang dipenuhi	%	65	78,8	121,23	Sangat Baik
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 7		109,81				Sangat baik
Jumlah Nilai Rata-Rata Capaian		96,44				Baik

Penyelenggaraan kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp. 1,410,626,047,131 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1,334,504,795,398 atau 94,60% dari anggaran yang dialokasikan dan efisiensi anggaran dengan status **EFISIEN**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii	
DAFTAR ISI	v	
DAFTAR TABEL	vi	
DAFTAR GRAFIK	viii	
DAFTAR GAMBAR	ix	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Maksud, Tujuan dan Fungsi	2
	1.3 Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	2
	1.4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2022	10
	1.5 Sistematika Penyusunan Laporan	14
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	16
	2.1 Rencana Strategis	16
	2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	21
	2.3 Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022	23
	2.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022	30
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	31
	3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	31
	3.2 Capaian Kinerja Organisasi	32
	3.3 Analisis Capaian Kinerja	34
	3.3.1 Sasaran Strategis 1	35
	3.3.2 Sasaran Strategis 2	45
	3.3.3 Sasaran Strategis 3	53
	3.3.4 Sasaran Strategis 4	76
	3.3.5 Sasaran Strategis 5	85
	3.3.6 Sasaran Strategis 6	93
	3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022	108
BAB IV	PENUTUP	116
LAMPIRAN	Pernyataan Reviu LKjIP Tahun 2021 dari Inspektorat Kota Banda Aceh	
	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021	
	Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	3
Tabel 1.2	Nama OPD dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh	4
Tabel 1.3	Daftar Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemerintah Kota Banda Aceh.....	6
Tabel 1.4	Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.....	8
Tabel 1.5	Jumlah ASN Pemerintah Kota Banda Aceh Berdasarkan Golongan dan Jabatan.....	9
Tabel 1.6	Hubungan Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh Berdasarkan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022.....	11
Tabel 1.7	Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	13
Tabel 2.1	Penjabaran Misi dalam Tujuan Pembangunan Daerah beserta Indikator dan Target selama 5 (lima) Tahun.....	20
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2021.....	21
Tabel 2.3	Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	24
Tabel 2.4	Tabel Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	30
Tabel 3.1	Kategori Rentang Capaian Kinerja	32
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022	33
Tabel 3.3	Kategori Rentang Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022	34
Tabel 3.4	Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2022.....	35
Tabel 3.5	Hasil Perhitungan IKS Banda Aceh Tahun 2022.....	38
Tabel 3.6	Kondisi IKS Tahun 2022.....	40
Tabel 3.7	Perbandingan Capaian IKS	41
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Sasaran 1 terhadap target RPJMD	44
Tabel 3.9	Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2022	45
Tabel 3.10	Data Dukung Rapor Pendidikan dari Kemendikbud	49
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Sasaran 2 terhadap target RPJMD	52
Tabel 3.12	Realisasi Indikator Sasaran 3.....	53
Tabel 3.13	Realisasi Indikator Kinerja Angka Kemiskinan Sasaran 3.....	53
Tabel 3.14	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota dalam Provinsi Aceh.....	53
Tabel 3.15	Metode Pengukuran Kemiskinan	55
Tabel 3.16	Rekapitulasi Capaian SPM Kab/Kota di Aceh Tahun 2022.....	57
Tabel 3.17	Target dan Realisasi Indikator Kinerja ANKga Kemiskinan terhadap target RPJMD	58
Tabel 3.18	Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka Sasaran 3 Tahun 2022...60	
Tabel 3.19	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka 2018-2022	61

Tabel 3.20	Target dan Realisasi Indikator Kinerja tingkat Pengangguran Terbuka terhadap target RPJMD	62
Tabel 3.21	Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Sasaran 3 Tahun 2022 ..	66
Tabel 3.22	Realisasi Investasi Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2021 Per-Sektor Usaha	66
Tabel 3.23	Persentase Peningkatan Nilai Investasi secara Tahunan	68
Tabel 3.24	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Nilai Investasi Sasaran 3 terhadap target RPJMD	71
Tabel 3.25	Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2022	76
Tabel 3.26	Capaian Indikator Keluarga Swehat Kota Banda Aceh Tahun 2022 Berdasarkan Aplikasi.....	77
Tabel 3.27	Indeks Keluarga Sehat Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	79
Tabel 3.28	Indeks Keluarga Sehat Provinsi Aceh Tahun 2022	80
Tabel 3.29	Target dan Realisasi Sasaran 4 terhadap RPJMD	82
Tabel 3.30	Kendala dalam Pencapaian Target Indeks Keluarga Sehat (IKS) di Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	83
Tabel 3.31	Realisasi Indikator Sasaran 5.....	85
Tabel 3.32	Nilai SKM Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	86
Tabel 3.33	Nilai IKM Kota Banda Aceh Tahun 2021-2022	88
Tabel 3.34	Perbandingan IKM Kota Banda Aceh dengan daerah lain.....	91
Tabel 3.35	Realisasi dan Target Indikator Kinerja IKM sasarn 5 terhadap target RPJMD	93
Tabel 3.36	Realisasi Indikator Sasaran 6.....	94
Tabel 3.37	Realisasi dan Target Sasaran 6 terhadap target RPJMD	95
Tabel 3.38	Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2022.....	96
Tabel 3.39	Realisasi Indikator Kinerja Angka Kemiskinan Sasaran 3.....	97
Tabel 3.40	Realisasi Indikator Kinerja Angka Kemiskinan Sasaran 3.....	101
Tabel 3.41	Target dan Realisasi Sasaran 7 terhadap target RPJMD	107
Tabel 3.42	Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022.....	109
Tabel 4.1	Rekapitulasi Capaian Sasaran	116

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Target dan Realisais Sasaran Startegis 1 terhadap target RPJMD	45
Grafik 3.2	Realisasi dan Target Sasaran Strategis 2 terhadap target RPJMD	52
Grafik 3.3	Kemiskinan Kab/Kota Tahun 2022	55
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka Kemiskinan terhadap target RPJMD ...	59
Grafik 3.5	tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Bana Aceh Tahun 2018-2022	61
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Trebuka terhadap target RPJMD	63
Grafik 3.7	Realisasi Investasi Kota Banda Aceh Tahun 2018-2022	69
Grafik 3.8	Realisasi dan Target Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Nilai Investasi Sasaran 3 terhadap Target RPJMD.....	72
Grafik 3.9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap target RPJMD	93
Grafik 3.10	Target dan Realisasi Saasaran6 terhadap target RPJMD Tahun 2022	96
Grafik 3.11	IPM dan IPG Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021	98
Grafik 3.12	IPG Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Indonesia Tahun 2017-2021.....	100
Grafik 3.13	Skor Kota Layak Anak Kota Banda Aceh Tahun 2017-2021.....	103
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan Gender (IPG) Sasaran 7 terhadap target RPJMD	107
Grafik 3.15	Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi Sasaran 7 terhadap target RPJMD.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proporsi ASN Pemerintah Kota Banda Aceh Berdasarkan Pendidikan.....	10
------------	---------------------------------------------------------------------	----



**PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH**

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
- 1.3 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 1.4 SASARAN DAN PRIORITAS
PEMBANGUNAN KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2022
- 1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu kewajiban dari setiap instansi pemerintahan untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan/penyelenggaraan urusan pemerintahan selama satu periode waktu tertentu. LKjIP sebagai salah satu dokumen penting dari pemerintahan, dapat juga dijadikan sebagai rapor kinerja dari instansi pemerintahan untuk melihat sejauh mana pencapaian dari Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh (LKjIP Kota Banda Aceh) Tahun 2022 merupakan wujud tanggung jawab dan komitmen dari Pemerintah Kota Banda Aceh dalam menjalankan amanah dari peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang-undangan/dasar hukum yang dipedomani dalam penyusunan dokumen LKjIP Kota Banda Aceh Tahun 2022 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022;
6. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022;
7. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2022.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan LKjIP Kota Banda Aceh tahun 2022 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tujuan penyusunan LKjIP Kota Banda Aceh tahun 2022 memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kota untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.3 Gambaran Umum Kondisi Daerah

1.3.1 Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, letak Kota Banda Aceh sebagai ibukota Provinsi Aceh berada di bagian barat Indonesia dengan letak geografis berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT. Kota ini terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan 90 (sembilan puluh) Gampong (desa). Luas wilayah Kota Banda Aceh secara administratif adalah 61,36 km² atau 6136 Ha, namun berdasarkan hasil digitasi GIS Citra Satelit Resolusi Tinggi pada Tahun 2015, luas wilayah Kota Banda Aceh secara spasial mengalami perubahan luas wilayah yaitu menjadi 59,002 km². Berkurangnya luas wilayah tersebut akibat adanya bagian daratan di pesisir sepanjang garis pantai Kota Banda Aceh yang masuk ke area perairan laut dan penyesuaian tapal batas gampong setelah terjadinya bencana Tsunami 2004.

Secara administrasi batas-batas wilayah Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selat Malaka

Sebelah Timur : Kecamatan Krueng Barona Jaya dan Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar

Sebelah Selatan : Kecamatan Darul Imarah dan Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar

Sebelah Barat : Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar

Secara demografi jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2022 yaitu 257.635 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 129.868 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak

127.767 jiwa, Adapun penduduk kota Banda Aceh dikelompokkan menurut umur dan jenis kelamin tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis Kelamin
Kota Banda Aceh tahun 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	12900	12484	25384
5-9	12229	11692	23921
10-14	11910	11503	23413
15-19	9241	8835	18076
20-24	10041	9631	19672
25-29	10949	11688	22637
30-34	11808	12523	24331
35-39	11377	11057	22434
40-44	9665	8704	18369
45-49	8152	7834	15986
50-54	6692	6857	13549
55-59	5654	5359	11013
60-64	3967	3668	7635
65-69	2708	2713	5421
70-74	1515	1657	3172
75+	1060	1562	2622
Kota Banda Aceh	129.868	127.767	257.635

Sumber BPS (Kota Banda Aceh dalam angka 2023)

1.3.2 Gambaran Umum Pemerintah Kota Banda Aceh

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh ditetapkan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dimana total OPD di Kota Banda Aceh berjumlah 44 OPD. Dari 44 OPD tersebut, terdapat 6 Sekretariat, 1 Inspektorat, 22 Dinas, 5 Badan, 1 Rumah Sakit Umum Daerah, dan 9 Kecamatan. Adapun rincian OPD di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2**Nama OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh**

No	Kriteria	Nama OPD		Keterangan
1.	Sekretariat	1.	Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh	
		2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh	
		3.	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh	Penyelenggara Keistimewaan Aceh
		4.	Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh	Penyelenggara Keistimewaan Aceh
		5.	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh	Penyelenggara Keistimewaan Aceh
		6.	Sekretariat Baitul Mal Kota Banda Aceh	Penyelenggara Keistimewaan Aceh
No	Kriteria	Nama OPD		Keterangan
2.	Inspektorat	1	Inspektorat Kota Banda Aceh	
3.	Dinas	1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	
		2.	Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh	
		3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh	
		4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh	
		5.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh	
		6.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh	
		7.	Dinas Sosial Kota Banda Aceh	
		8.	Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh	
		9.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh	

		10.	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh	
		11.	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	
		12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh	
		13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kota Banda Aceh	
		14.	Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh	
		15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh	
		16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh	
		17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh	
		18.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh	
No	Kriteria	Nama OPD		Keterangan
		19.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh	
		20.	Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh	
		21.	Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	Penyelenggara Keistimewaan Aceh
		22.	Dinas Pendidikan Dayah Kota Banda Aceh	Penyelenggara Keistimewaan Aceh
4.	Badan	1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh	
		2.	Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh	
		3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh	
		4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh	
		5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh	

5.	Rumah Sakit Umum	1.	Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh	
6.	Kecamatan	1.	Kecamatan Baiturrahman	
		2.	Kecamatan Banda Raya	
		3.	Kecamatan Jaya Baru	
		4.	Kecamatan Meuraxa	
		5.	Kecamatan Kutaraja	
		6.	Kecamatan Kuta Alam	
		7.	Kecamatan Syiah Kuala	
		8.	Kecamatan Ulee Kareng	
		9.	Kecamatan Lueng Bata	

Dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, pada perangkat daerah juga dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). Pemerintah Kota Banda Aceh memiliki 23 UPTD dan 2 UPTB yang tersebar di 11 OPD. Adapun rincian OPD yang memiliki UPTD/UPTB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Daftar Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan
Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pemerintah Kota Banda Aceh

No	OPD Penanggung Jawab	Nama UPTD/UPTB	
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh	1.	UPTD Sanggar Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan (Tekkomdik)
		2.	UPTD Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF)
2.	Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh	3.	UPTD Instalasi Farmasi
		4.	UPTD Puskesmas Meuraxa
		5.	UPTD Puskesmas Jaya Baru
		6.	UPTD Puskesmas Banda Raya
		7.	UPTD Puskesmas Baiturrahman
		8.	UPTD Puskesmas Batoh
		9.	UPTD Puskesmas Kuta Alam

		10.	UPTD Puskesmas Lampulo
		11.	UPTD Puskesmas Lampaseh Kota
		12.	UPTD Puskesmas Kopelma Darussalam
		13.	UPTD Puskesmas Jeulingke
		14.	UPTD Puskesmas Ulee Kareng
3.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.	UPTD Rumah Susun Sederhana Sewa
4.	Dinas Sosial	16.	UPTD Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (LPKS ABH) NIRMALA
5.	Dinas Tenaga Kerja	17.	UPTD Balai Latihan Kerja
6.	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan	18.	UPTD Rumah Potong Hewan
7.	Dinas Perhubungan	19.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
		20.	UPTD Terminal
No	OPD Penanggung Jawab	Nama UPTD/UPTB	
8.	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	21.	UPTD Pasar
		22.	UPTD Metrologi Legal
9.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.	UPTD Sistem Informasi Geografis
10.	Badan Pengelolaan Keuangan Kota	24.	UPTD Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPB dan BPHTB)
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana	25.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak

Sedangkan untuk jumlah jabatan struktural dan fungsional tertentu yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4**Jumlah Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan
Pemerintah Kota Banda Aceh**

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIa	1
2	Eselon IIb	36
3	Eselon IIIa	57
4	Eselon IIIb	108
5	Eselon Iva	164
6	Eselon Ivb	43
7	Fungsional tertentu	270

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional sebanyak 270 jabatan penyetaraan dan telah melakukan perubahan Peraturan Wali kota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja (SOTK) terkait penyederhanaan struktur dan penyetaraan jabatan sebanyak 2 OPD yaitu Inspektorat dan Bappeda.

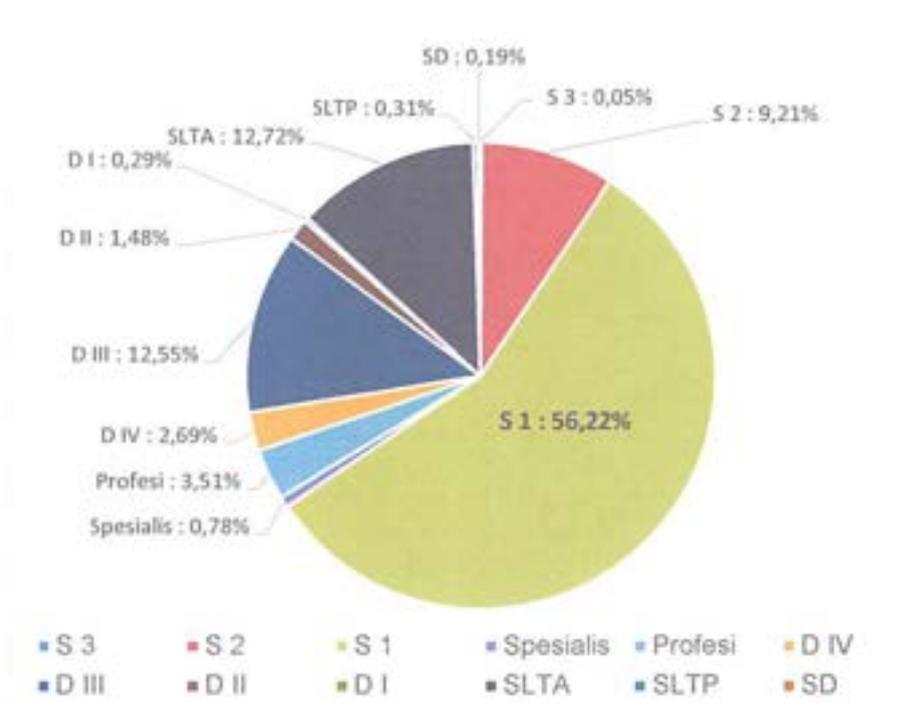
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pemerintah Kota Banda Aceh haruslah memiliki sumber daya manusia, dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), yang dapat mendorong serta mendukung terhadap pencapaian kinerja. ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang ditempatkan pada perangkat daerah per 31 Desember 2022 adalah sebanyak 4.129 orang. Informasi terkait dengan ASN Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam tabel berikut:

(30,57%), fungsional kesehatan: 570 orang (15,18%), fungsional lainnya: 359 orang (9,56%), dan fungsional PPPK 172 orang (4,58%).

Jumlah ASN Pemerintah Kota Banda Aceh Berdasarkan Pendidikan

Proporsi ASN Pemerintah Kota Banda Aceh apabila didasarkan pada pendidikan maka dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 1.1.
Proporsi ASN Pemerintah Kota Banda Aceh Berdasarkan Pendidikan



Sumber : BKPSDM Kota Banda Aceh Tahun 2022

Berdasarkan gambar 1.1. di atas, dapat disampaikan bahwa lebih dari separuh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh telah menamatkan pendidikan sarjana (S1/D-IV) yakni sebanyak 2.433 orang atau 58,92%, diikuti dengan D-I/D-II/D-III (591 orang; 14,31%), SLTA (546 orang; 13,22%), S2 (380 orang; 9,20%), Profesi dan Spesialis (177 orang; 4,29%), dan S3 (2 orang; 0,05%).

1.4 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2022

Perencanaan pembangunan Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh. Dalam penyusunan

dokumen Perubahan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJMD Kota yang telah ditetapkan dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, serta mengacu pada RKP Tahun 2023 serta RPJMN 2020-2024 guna keselarasan dengan prioritas pembangunan Nasional. Visi pembangunan Kota Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 yaitu:

“Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah”

1.4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam pelaksanaan pembangunan tahunan dijabarkan berdasarkan visi dan misi dengan memperhatikan seluruh potensi yang ada. Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6

**Hubungan Visi, Misi dan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Banda Aceh
Berdasarkan RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022**

Visi: Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syariah					
Misi		Tujuan		Sasaran	
Misi 1.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Penguatan Aqidah, Syariah dan Akhlak	1.	Terwujudnya nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh	1.	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam.
Misi 2.	Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga	1.	Mewujudkan pendidikan Kota Banda Aceh yang bermutu, berdaya saing, dan berkarakter Islami dan berprestasi	1.	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan

Misi 3.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat	1.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	1.	Peningkatan kesejahteraan masyarakat
Misi 4.	Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1.	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat
Misi		Tujuan		Sasaran	
Misi 5.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	1.	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi
				2.	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Misi 6.	Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan	1.	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni
				2.	Mitigasi kebencanaan yang tangguh
				3.	Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan
Misi 7.	Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk	1.	Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak
				2.	Pengendalian pertumbuhan penduduk.

Sumber: RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022

1.4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2022

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, Kota Banda Aceh menetapkan prioritas pembangunan Tahun 2022 yang dirumuskan untuk menyelesaikan

permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan melanjutkan prioritas pembangunan yang belum tercapai pada tahun sebelumnya. Di samping itu, juga ditetapkan tema pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2022 yang diselaraskan dengan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Aceh.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan target RPJMD. Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah dan dihubungkan dengan program pembangunan daerah. Selain itu, Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh juga diselaraskan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Aceh Tahun 2022. Penetapan Prioritas pembangunan daerah dapat menjadi arahan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan, dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Secara rinci, tema dan prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan Kota Banda Aceh Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.7
Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh, dan
Kota Banda Aceh Tahun 2022

Tema RKP Nasional Tahun 2022	Tema RKP Aceh Tahun 2022	Tema RKP Kota Banda Aceh Tahun 2022
"Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"	"Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing Untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi yang Inklusif"	"Meningkatkan Pertumbuhan dan Kontribusi Riil Sektor Perekonomian serta Memperkokoh Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah"
Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Aceh	Prioritas Pembangunan Kota Banda Aceh

↓	↓	↓
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1. Menumbuhkan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif	1. Pemberdayaan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas	2. Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	3. Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi dan Lingkungan	3. Peningkatan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Keistimewaan Aceh	4. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Fungsionalisasi Sarana Infrastruktur
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		5. Pelayanan Sosial dan Mitigasi Bencana
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum dan Transformasi Pelayanan		

1.5 Sistematika Penyusunan Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah dan pemerintah Kota Banda Aceh

Bab II. Perencanaan Kinerja

Pada bab ini disajikan mengenai rencana strategis, diuraikan ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan anggaran serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan data serta analisis capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2022, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV. Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja tahun 2022 dan rencana tindak lanjut terhadap perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan data penghargaan data lainnya yang diperlukan.



**PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 RENCANA STRATEGIS
- 2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
- 2.3 PROGRAM DAN ANGGARAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
- 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2022



**BAB II
PERENCANAAN KINERJA****2.1 RENCANA STRATEGIS**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya Visi dan Misi yang merupakan arahan bagi penyusunan program dan kegiatan selama 5 (lima) Tahun. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada rentang waktu tertentu. Visi akan menjadi arahan bagi keseluruhan kebijakan yang diambil dan dijalankan. Visi dilaksanakan melalui sejumlah misi yang merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelaksanaan pembangunan, suatu pemerintahan membutuhkan adanya visi dan misi sebagai panduan bagi penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahunan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, yang merupakan tahun ke-5 artinya tahun terakhir kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh.

Amanah dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengamanatkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024 dimana pasal 201 ayat (9) disebutkan untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023 diangkat penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilu serentak Nasional pada Tahun 2024, sehingga berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.11-1418 Tanggal 7 Juli 2022 dilaksanakan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Pj. Walikota Banda Aceh **H. BAKRI SIDDIQ, SE. M.Si** melanjutkan kepemimpinan **H. AMINULLAH USMAN, SE.Ak, MM** (Walikota) dan **Drs. ZAINAL ARIFIN** (Wakil Walikota) yang telah memasuki purna bakti dan mengemban amanah untuk melanjutkan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam perencanaan pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2022.



Pelantikan Pj. Walikota Banda Aceh H. Bakri Siddiq, SE. M.Si di gedung serbaguna Setda Aceh, Banda Aceh.

RPJMD Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2017-2023 secara garis besar memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kota Banda Aceh, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai oleh Kepala Daerah pasangan H. AMINULLAH USMAN, SE.Ak, MM (Walikota) dan Drs. ZAINAL ARIFIN (Wakil Walikota) ingin membawa KOTA BANDA ACEH sebagai berikut :

VISI

**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017-2022**

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDA ACEH
GEMILANG DALAM BINGKAI SYARIAH”**

Demi terwujudnya **Visi**, maka dilaksanakan **Misi**, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Aqidah, Syariah, dan Akhlak
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat
4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
6. Membangun Infrastruktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan
7. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam bingkai Syariah		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, syariah dan akhlak	1. Terwujudnya nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan warga kota Banda Aceh	1. Meningkatnya pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh tentang Syariat Islam 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam.
Misi 2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga	. Mewujudkan pendidikan kota Banda Aceh yang bermutu, berdaya saing, dan berkarakter Islami	1. Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan

<p>Misi 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pariwisata dan kesejahteraan masyarakat</p>	<p>Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan merata,</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Meningkatnya pertumbuhan UMKM 2.Meningkatnya transaksi keuangan berbasis Syariah 3.Meningkatnya pendapatan asli daerah 4.Meningkatnya jumlah investasi 5.Meningkatnya pertumbuhan pariwisata 6.Meningkatnya kesejahteraan
<p>Misi 4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat</p>	<p>Meningkatkan status kesehatan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Penanggulangan penyakit menular 2.Meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
<p>Misi 5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<p>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi 2.Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan yang baik 3.Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
<p>Misi 6. Membangun infrastruktur kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kinerja layanan Air Minum dan Sanitasi 2. Meningkatkan Pelayanan Sistem Jaringan Jalan dalam sistem transportasi kota 3. Tersedianya tempat tinggal dengan standar minimal 4. Meningkatkan cakupan layanan transportasi publik 5. Tersedianya ruang terbuka hijau 6. Terwujudnya mitigasi kebencanaan yang tangguh dan handal 7. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan
<p>Misi 7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</p>	<p>Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.Terlindunginya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan 2.Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk.

Sumber : RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022

Kota Banda Aceh. Target Kinerja merupakan presentasi nilai yang dicapai selama Tahun berjalan. Target Kinerja pada sasaran strategis menjadi hal penting dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya mencapai Visi dan Misi.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, dan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Kota Banda Aceh Tahun 2022, serta dokumen anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh Tahun 2022.

Tema atau fokus pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2022 adalah: **"Meningkatkan Pertumbuhan dan Kontribusi Rill sektor Perekonomian serta memperkokoh peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah"**. Selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Walikota Banda Aceh. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022 tersaji pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terwujudnya nilai - nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh	85
	OPD Penanggungjawab : Dinas Syaria'at Islam, OPD Pendukung : Dinas Pendidikan Dayah, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh.			

Mewujudkan pendidikan Kota Banda Aceh yang bermutu, berdaya saing, berkarakter Islami dan berprestasi	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	80%
OPD Penanggungjawab : Dinas Pendidikan Kebudayaan, OPD Pendukung : Dinas Perpustakaan & Kearsipan, Dinas Pendidikan Dayah, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah			
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan Berkelanjutan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	18.263 Jiwa
		Tingkat Pengangguran Terbuka	5,68%
		Persentase Peningkatan Nilai Investasi	100%
OPD Penanggungjawab : Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. OPD Pendukung : Sekretariat Baitul Mal, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah & Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.			
Meningkatkan status kesehatan masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	0,9
OPD Penanggungjawab : Dinas Kesehatan OPD Pendukung : Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa			
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
OPD Penanggungjawab : Sekretariat Daerah OPD Pendukung : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat DPRK, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Inspektorat, Satpol PP & WH, Kecamatan			

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	63,40
OPD Penanggungjawab : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, OPD Pendukung : Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk	Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,10%
		Persentase Indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi	65%
OPD Penanggungjawab : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			

2.3 Program dan Anggaran Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022

Proses pencapaian tujuan atau sasaran pada Tahun 2022 didukung oleh program program tersaji pada Tabel 2.3:

Tabel 2.3
Program dan Anggaran Pemerintah
Kota Banda Aceh Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
		Rp.	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp.	560,848,209,654
2	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Rp.	6,696,282,340
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Rp.	430,354,977
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp.	92,562,433,044
5	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp.	8,298,000
6	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp.	34,650,000
7	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp.	47,496,488,196

8	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp.	718,438,535
9	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp.	309,973,190
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp.	763,216,175
11	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp.	175,734,207,661
12	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp.	594,815,472
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp.	7,616,455,528
14	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp.	408,240,009
15	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp.	5,204,208,168
16	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Rp.	20,405,565,357
17	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp.	9,991,427,139
18	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp.	25,022,812,350
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp.	37,359,042,752
20	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp.	628,529,379
21	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp.	414,708,067
22	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp.	2,002,495,845
23	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp.	1,139,149,192
24	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp.	1,461,512,258
25	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp.	1,366,582,690
26	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp.	5,842,541,716
27	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp.	6,664,893,480
28	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp.	21,310,700
29	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp.	2,120,368,465
30	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp.	3,854,995,561
31	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp.	262,686,090
32	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp.	34,999,919
33	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp.	14,000,000

34	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp.	244,499,582
35	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp.	470,968,310
36	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp.	259,711,350
37	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rp.	77,762,625
38	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Rp.	20,728,330
39	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp.	379,470,394
40	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp.	622,012,427
41	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp.	377,431,880
42	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp.	28,250,450
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	620,147,066
44	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp.	7,725,439,194
45	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp.	20,096,900
46	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp.	55,898,949
47	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp.	15,308,847
48	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp.	6,828,168,413
49	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp.	70,624,739
50	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp.	110,860,717
51	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp.	32,177,150
52	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp.	28,487,361
53	PROGRAM PENATAAN DESA	Rp.	1,771,666,341
54	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp.	1,080,973,929
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp.	1,019,088,908
56	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp.	3,710,790,000
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp.	31,428,284
58	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp.	27,560,092,257

59	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp.	2,641,929,817
60	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp.	8,675,743,487
61	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp.	404,604,000
62	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp.	12,301,851
63	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp.	7,282,364,506
64	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp.	39,262,077
65	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp.	12,303,000
66	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp.	74,798,164
67	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp.	395,394,000
68	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp.	562,089,529
69	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp.	302,860,253
70	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp.	15,713,553,612
71	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp.	702,100,000
72	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp.	88,337,528
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp.	30,000,000
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp.	28,014,870
75	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp.	375,958,340
76	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp.	200,350,000
77	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Rp.	125,194,326
78	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp.	929,315,050
79	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp.	63,664,700
80	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Rp.	2,098,406,000
81	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp.	3,198,789,000
82	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp.	2,616,620,000
83	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp.	8,366,540,132
84	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp.	1,173,527,420

85	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp.	101,717,579
86	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp.	456,015,106
87	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp.	808,807,500
88	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp.	5,983,297,251
89	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp.	49,463,440
90	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp.	13,547,600
91	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp.	16,463,245,737
92	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp.	1,178,328,026
93	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp.	43,423,298
94	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Rp.	2,948,262
95	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp.	21,104,882,560
96	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp.	3,525,872,901
97	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp.	2,975,582,659
98	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp.	24,622,621,895
99	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	2,263,145,805
100	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp.	466,755,223
101	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp.	144,296,340,831
102	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp.	3,353,240,317
103	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp.	2,115,320,393
104	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp.	2,952,097,047
105	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp.	1,592,528,653
106	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp.	644,443,650
107	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp.	1,449,410,288
108	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	126,847,467

109	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	24,834,444
110	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	44,192,349
111	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	41,783,875
112	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	26,929,413
113	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	10,972,752
114	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	46,861,000
115	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	1,942,500
116	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	19,383,550
117	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	64,011,174
118	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	7,503,253
119	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	38,775,922
120	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	137,228,000
121	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	4,350,000
122	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	8,955,000
123	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	86,687,374
124	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	13,181,717
125	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	15,769,246
126	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	41,284,176
127	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	9,340,232
128	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	11,505,564
129	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	23,150,000

130	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	37,122,829
131	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	23,066,578
132	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp.	36,900,000
133	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp.	8,868,660
134	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	2,137,500
135	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp.	74,225,050
136	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp.	4,893,362,312
137	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp.	29,075,690
138	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp.	643,409,577
139	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp.	1,485,623,325
140	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Rp.	16,515,517,457
141	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Rp.	296,485,150
142	PROGRAM BAITUL MAL	Rp.	22,001,730,000
Total		Rp.	1,410,626,047,131

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh program yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebanyak 142 Program dengan total Anggaran sebesar Rp. 1.410.626.047.131.

2.4 Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Indikator kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh tercantum dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 telah dilakukan perubahan sesuai dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 442 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Adapun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022 tersaji pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan Syariat Islam	Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh	85
	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	80%
	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	1) Angka kemiskinan	18.263 jiwa
		2) Tingkat Pengangguran Terbuka	5,68%
		3) Persentase peningkatan nilai investasi	100%
	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	0,9
	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90
	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	63,40
	Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	1) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,10%
		2) Persentase Indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi	65%



**PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- 3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA
- 3.3 REALISASI ANGGARAN



**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam kurun waktu tertentu dan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran strategis dengan realisasi pada tahun 2022. Kemudian dilakukan penghitungan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) dan selanjutnya dianalisis tingkat keberhasilan setiap indikator untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan maupun kegagalan sebagai strategi dan rekomendasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penetapan kebijakan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator kinerja menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pentunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh terdiri dari :

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progres Positif**), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (**Progres Negatif**), dengan menggunakan rumus:

$$\text{Persentase tingkat capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran tersaji dalam tabel 3.1:

Tabel 3.1
Kategori Rentang Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	76% sampai 100%	Baik
3.	55% sampai 75%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh menyajikan setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun 2022, kemudian melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir, perbandingan target jangka menengah dan secara nasional. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau penurunan kinerja dengan menyajikan data-data kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun

kegagalan pencapaian kinerja. Hasil capaian kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2022 disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	(% Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	(% Capaian RPJMD 2022	Kategori Capaian
				Target	Realisasi	(%) Capaian			
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh	Indeks	95,96	85	79,85	93,94	85	93,94	Baik
Rata-Rata Capaian Sasaran 1							93,94		Baik
Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	%	108,06	80	83,21	104,06	80	104,06	Sangat Baik
Rata-Rata Capaian Sasaran 2							104,06		Sangat Baik
Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	Jiwa	87,60	18,263	19,900	91,04	18,263	91,04	Baik
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	68,01	5,68	8,62	48,24	5,68	48,24	Kurang
	Persentase Peningkatan Nilai investasi	%	107,73	100	59,36	59,36	100	59,36	Cukup
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 3							66,21		Cukup
Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	Indeks	102,50	0,90	0,81	90	0,90	90	Baik
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 4							90		Baik
Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	103,49	90	89,16	99,07	90	99,07	Baik
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 5							99,07		Baik
Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota	Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	Indeks	112,88	63,40	71,00	112	63,40	112	Sangat Baik

Layak Huni									
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 6							112	Sangat Baik	
Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	Indeks pembangunan Gender (IPG)	%	98,47	97,1	95,54	98,39	97,1	98,39	Baik
	Persentase Indikator Kota Layak anak yang dipenuhi	%	111,77	65	78,8	121,23	65	121,23	Sangat Baik
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 7							109,81	Sangat Baik	
Jumlah Nilai Rata-Rata Capaian							96,44	Baik	

Dari hasil analisis terhadap 7 (tujuh) sasaran yang mencakup 10 (sepuluh) indikator kinerja, dapat diketahui bahwa 3 (tiga) sasaran strategis kinerja mendapat kategori "**Sangat Baik**", 3 (tiga) sasaran strategis kinerja mendapat kategori "**Baik**" dan 1 (satu) sasaran strategis kinerja mendapat kategori "**Cukup**", adapun sasaran tersebut dikelompokkan sesuai predikat kinerja tersaji dalam Tabel 3.3:

Tabel 3.3
Kategori Rentang Capaian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Kategori Capaian	Jumlah Sasaran	%
1	Sangat Baik	3	42,86
2	Baik	3	42,86
3	Cukup	1	14,29
4	Kurang	-	-
Jumlah		7	100

3.3 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dari 7 (tujuh) sasaran strategis Pemerintah Kota Banda Aceh pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Syariat Islam”

Indikator Kinerja, target, realisasi, capaian dan kategori dari sasaran strategis 1 disajikan dalam tabel 3.4 berikut ini:

Tabel 3.4
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1

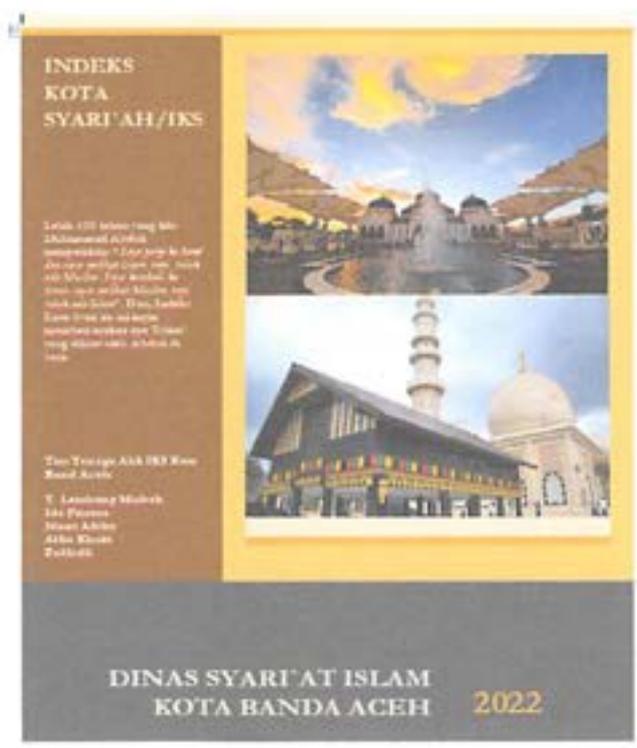
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		(% Capaian	kategori
			Target	Realisasi		
1.	Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh	Indeks	85	79,85	93,94	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja					93,94	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat dalam Penerapan Syariat Islam**” dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan **Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **93,94**. Keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- ◆ Indikator Kinerja “Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh” yang ditargetkan sebesar 85 dapat direalisasikan sebesar 79,85 dengan persentase tingkat capaian sebesar 93,94% atau mendapat kategori Baik.

Visi pembangunan Kota Banda Aceh 2017-2022, yang tentunya masih dilanjutkan oleh kepemimpinan Pj. Walikota Banda Aceh hingga saat ini mengangkat tema ‘Banda Aceh Kota Gemilang dalam Bingkai Syariah’. Syari’ah menjadi dasar tersendiri dalam pembangunan Kota Banda Aceh. Untuk itu Dinas Syariat Islam sebagai instansi dengan tugas terkait pelaksanaan syari’at Islam mengembangkan satu metode ukur dengan nama ‘Indeks Kota Syariah’ (IKS). Seperti indeks lainnya, ‘Kota Islami’, ‘Daerah Islami’, bahkan ‘Negara Islami’, IKS tetap mengedepankan kebutuhan hidup utama yang harus dipenuhi dalam proses pembangunan, yaitu *kemashlahatan*, sehingga IKS dapat menunjukkan indikasi capaian pembangunan Kota Banda Aceh berdasarkan pesan keislaman. Islamic Research Training Institute (IRTI) mengembangkan aksioma (pemaknaan) terhadap 5 *Maqashid Syari’ah* (MS), sehingga secara operasional dapat

digunakan untuk mengukur capaian pembangunan, yang kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Banda Aceh.



Dimensi yang menjadi skor Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh, adapun penjelasan Syariah dan Maqashid Syariah sebagai berikut:

Kata *syara'* secara etimologi berarti "jalan yang dapat di lalui air", maksudnya adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah. *Syariat Islam* adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Secara etimologi syariah juga berarti aturan atau keketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebajikan.

Dalam dimensi hukum, kajian maqashid al-syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial.

Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya.

Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syar'ah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

Pengertian Maqasid Al-Khamsah

Maqasid al-Khamsah adalah 5 tujuan syariat yang meliputi aspek kehidupan yaitu :

1. Hifdzu Al-Din (melindungi agama)

Pentingnya perlindungan terhadap Aqidah dan ajaran syariat serta pembelaan terhadap penistaan dan pelecehan nilai-nilai Agama.

2. Hifdzu Al-Nafs (melindungi jiwa)

Syariat islam sangat menjunjung tinggi terhadap jiwa manusia sehingga perlu adanya perlindungan terhadap keselamatan dan martabat jiwa manusia.

3. Hifdzu Al-'Aql (melindungi akal/pikiran)

Syariat Islam menepatkan akal budi pada suatu tempat yang mulia sehingga perlu dijaga keberadaannya dan perlindungan terhadap hal-hal yang dapat menghilangkan atau merusak akal.

4. Hifdzu Al-mal (melindungi harta)

Pengamanan hak serta pembelaan terhadap keberadaan harta seseorang yang diatur melalui syariat

5. Hifdzu Al-Nasb (melindungi keturunan)

Syariat mengatur dan menjaga kemurnian keturunan melalui pernikahan dan melindungi generasi penerus dengan aturan yang jelas dan tegas.



Untuk menentukan sejumlah indikator yang terlihat dalam perhitungan IKS, telah dilakukan penelusuran terhadap Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Banda Aceh. Sebagian ada yang berupa nilai numerik, proporsi atau persentase, *rate* atau tingkat, rasio atau perbandingan, dan sebagian sudah berupa indeks. Terdapat juga indikator yang bersifat tunggal dan ada juga yang bersifat komposit.

Proses perhitungan nilai 5 (lima) indikator dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

Ke-1. Normalisasi data, yang sangat bergantung pada bentuk nilai dan ketersediaan acuan nilai ideal setiap indikator. Indikator yang memiliki acuan ideal yang jelas (misalnya standar pemerintah, atau pun hasil penelitian yang relevan), maka normalisasi dilakukan dengan metode *min-max*.

Ke-2. Pembobotan setimbang: (a) setiap dimensi (*maqasid*) dalam IKS diberi bobot sama; (b) setiap sub dimensi dalam dimensi diberi bobot sama; dan (c) setiap indikator dalam sub dimensi diberi bobot sama.

Ke-3. Agregasi nilai indikator, yang menggunakan metode agregasi linier dalam 3 tingkatan, yaitu: (1) agregasi sub dimensi dari indikator-indikator dalam sub dimensi; (2) agregasi dimensi (*maqasid*) dari masing-masing sub-dimensi dalam *maqasid*; dan (3) agregasi IKS dari dimensi-dimensi (*maqasid*) yang ada dalam IKS.

Hasil perhitungan dari 5 (lima) indikator tersebut secara rinci dapat lihat pada tabel 3.5:

Tabel 3.5

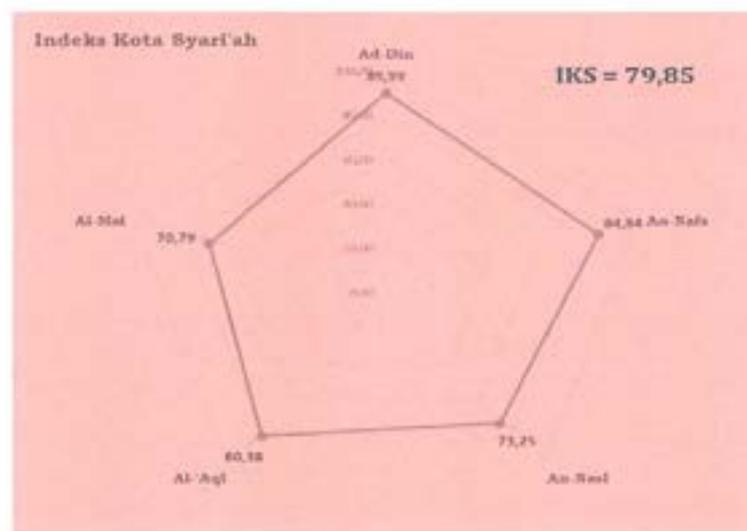
Hasil Perhitungan IKS Kota Banda Aceh Tahun 2022

Dimensi	Jumlah Sub Dimensi	Jumlah Indikator	Indeks Dimensi
Al-Din	9	18	89,99
Al-Nafs	18	46	84,84

Al-Nasl	4	12	73,25
Al-'Aql	7	22	80,38
Al-Mal	12	21	70,79
IKS	50	119	79,85

Sumber : Pendapat Ahli Tim Koordinasi Pembangunan Islami (TKPI) Kota Banda Aceh

Jumlah Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang berhasil dihitung pada tahun 2022 ini adalah sebanyak 119 indikator. Semua indikator tersebut kemudian dibagi ke dalam 5 dimensi maqashid, kemudian dikelompokkan menjadi 50 sub-dimensi. Hasil yang diperoleh, pembangunan di sektor **keagamaan (al-Din)** menjadi dimensi dengan indek tertinggi pada tahun 2022 ini, yaitu **89,99**, sementara yang terendah indeks dimensinya adalah sektor pembangunan **kesejahteraan/harta (al-Mal)**, yaitu **70,79**. Berikut ilustrasi nilai masing-masing dimensi yang menunjukkan adanya variasi antar masing-masing dimensi tersebut dapat dilihat pada diagram berikut:



Sumber : Pendapat Ahli Tim Koordinasi Pembangunan Islami (TKPI) Kota Banda Aceh

Penghitungan IKS di tahun 2022, yang telah melalui serangkaian konsultasi publik dan FGD bersama seluruh utusan OPD dan juga telah dipimpin langsung oleh Pj. Walikota dan Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh pada tanggal 28 Desember 2022, diperoleh 31 indikator yang kondisinya meningkat, sementara 20 indikator kondisinya turun. Namun atas berbagai keadaan penghitungan mencatat sebanyak 45 indikator belum memperoleh data terupdate dari instansi yang berwenang, seperti belum terdapat data terkini korban bencana yang menerima

bantuan bantuan sosial, jumlah pemustaka dan koleksi bacaan di perpustakaan, kuliner yang halal dan sehat, dan lainnya. Kedepan, kendala ini agar terus menjadi perhatian, terutama agar setiap instansi pemerintah melengkapi dan memberikan update perkembangan IKD sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Berikut kondisi sejumlah IKD yang diperoleh dan dihitung sebagai IKS dapat dilihat pada tabel 3.6:

Tabel 3.6
Kondisi IKS Tahun 2022

Kondisi 2022	Jumlah Indikator	Kalkulasi IKS
Membaik	31	Data 2022
Tetap	13	Data 2022
Memburuk	20	Data 2022
Inkonsisten	6	Data 2021
Belum Update	45	Data 2021
Indikator Baru	4	Data 2022

Data yang indikatornya belum update dan inkonsisten membuat perhitungan IKS 2022 menggunakan nilai data tahun 2021. Atau setidaknya menyulitkan proses penghitungan jika terdapat instansi yang memberikan IKD setelah proses penghitungan dilakukan, sehingga proses penghitungan harus diulangi. Kedepan diharapkan teknik konsultasi dan penghitungan IKS dapat lebih disesuaikan, terutama agar fokus pada pengelompokan OPD, dan tidak dilakukan dalam forum yang terlalu besar.

Sejumlah indikator yang inkonsisten dinilai disebabkan oleh beberapa kondisi, yaitu;

- satuan pengukurannya yang diberikan masih keliru (misalnya saat ditanyakan tentang realisasi zakat, namun data yang disajikan adalah realisasi zakat dalam jumlah gampong),
- Data belum rasional, misalnya rasio ketersediaan sekolah 0,32, yang kira-kira setara dengan 1:3, sehingga tidak mungkin terdapat 1 sekolah untuk setiap 3 penduduk,
- Data terlalu berbeda dari data sebelumnya, misalnya jumlah meunasah pada tahun 2021 adalah 180 meunasah, tapi data 2022 menjadi 45 meunasah, dan;
- Data indikator serupa tapi tak sama, misalnya yang dibutuhkan untuk perhitungan adalah data angka partisipasi murni (APM), tapi yang diberikan adalah angka partisipasi kasar (APK).

Untuk mengantisipasi hal ini agar tidak terus-menerus terjadi, apalagi agar target di tahun 2023 sekumpulan indikator yang menjadi tolok ukur IKS disajikan lebih baik dan akan memperoleh payung hukum oleh daerah, maka proses pemberian data dari OPD diupayakan melalui metode yang lebih baik.

Perkembangan IKS Kota Banda Aceh 2019-2022 secara total nilai IKS Kota Banda Aceh terus meningkat dalam 4 tahun terakhir. Terakhir di tahun 2022 ini bergerak naik hampir 3 point dari tahun 2021 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.7:

Tabel 3.7
Tabel perbandingan capaian IKS

Dimensi/Tahun	2019	2020	2021	2022
Al-Din	80,95	86,75	90,2	89,99
Al-Nafs	67,78	76,69	81,05	84,84
Al-Nasi	58,89	71,54	74,12	73,25
Al-'Aql	74,86	64,88	65,72	80,38
Al-Mal	66	76,26	72,77	70,79
IKS	69,7	75,22	76,77	79,85

Kendati demikian perkembangan IKS patut ditinjau lebih jauh pada masing-masing dimensi, mengingat peningkatan nilai IKS tahun 2022 tidak didukung oleh meningkatnya nilai keseluruhan dimensi. Ada nilai dimensi yang menurun, seperti dimensi al-Din, al-Nasi, dan al-Mal, dan ada nilai dimensi yang meningkat signifikan, yaitu Dimensi al-'Aql yang meningkat tajam hampir 15 point. Sementara itu nilai Dimensi al-Nafs hanya meningkat lebih dari 3 point.

Kenaikan nilai dimensi al-'Aql didukung oleh meningkatnya nilai dari 5 IKD, seperti rasio guru SD/MI dan SMP/MTs, dan juga jumlah guru kualifikasi S1 pada jenjang SD dan SMP. Selain itu juga terdapat 3 indikator baru dalam dimensi ini yang angkanya sangat baik (>90), seperti cakupan layanan komunikasi dan tingkat kebebasan pers. Dalam Dimensi al-'Aql ini juga terdapat sejumlah IKD yang menurun, seperti angka partisipasi mumi, rasio guru TK, dan persentase guru tersertifikasi pada jenjang SD dan SMP. Terdapat 3 IKD yang datanya inkonsisten, sehingga membutuhkan perhatian lebih lanjut, seperti rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan SMP/MTs, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan SD/MI, dan angka partisipasi mumi pendidikan PAUD.

Ketiganya terlihat berbeda jauh dengan data yang disajikan di tahun 2021, sehingga perhitungan mengakomodir kembali data tahun 2021.

Kenaikan nilai pada Dimensi al-Nafs terlihat didukung oleh peningkatan nilai dari 15 IKD, seperti persentase jalan di Kota Banda Aceh dalam kondisi baik, upaya/tindakan terhadap potensi bencana alam, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan), Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas serta IKD lainnya yang membaik. Meski demikian penting juga dicatat bahwa dimensi ini memiliki indikator terbanyak (46 IKD), dan saat ini terdapat 19 IKD yang tidak diberikan update oleh instansi terkait, sehingga perhitungan yang dilakukan menggunakan data tahun 2021.

Pada Dimensi al-Mal juga terjadi penurunan akibat sejumlah nilai IKD yang menurun, seperti meningkatnya koefisien gini, meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis, dan penurunan ini juga diikuti oleh tidak dupdatenya 10 IKD oleh instansi terkait untuk dapat dihitung dalam IKS, seperti jumlah lembaga keuangan syariah, pertumbuhan PDRB, persentase harta waqaf bersertifikat, bersengketa, produktif, sehingga perhitungan menggunakan data tahun sebelumnya, 2021.

Penurunan Dimensi al-Din terlihat disebabkan oleh menurunnya 2 IKD, yaitu tingkat kemakmuran masjid dan jumlah balai pengajian. Kendati terdapat 5 IKD yang nilainya meningkat, namun terdapat juga 4 IKD yang tidak diupdate oleh instansi terkait, seperti rasio jumlah masjid & musholla per-satuan penduduk muslim dan jumlah konflik akibat isu agama, sehingga perhitungan menggunakan data tahun lalu. Sedangkan jika diupdate dapat saja terdapat peningkatan yang positif.

Penurunan pada Dimensi al-Nasi lebih diakibatkan oleh 7 dari 12 IKD dalam dimensi ini yang tidak diberikan update oleh instansi terkait, kendati 4 IKD yang nilai capaiannya meningkat, sehingga dimensi ini turun tipis 1 point. diantara IKD yang tidak diupdate tersebut seperti jumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak dan angka perceraian di Kota Banda Aceh.

Secara umum hasil pengukuran kinerja pembangunan berbasis syariat kota Banda Aceh hingga tahun 2022 menunjukkan peningkatan. Namun demikian perkembangan pencapaian diantara kelima dimensi maqashid belum sama, bahkan ada yang menurun. Jika melihat pada ketercapaiannya, maka skor 79,76 saat ini sudah tergolong baik, namun untuk menuju *kaffah* maka hasil-hasil pembangunan secara umum harus lebih ditingkatkan lagi, minimal hingga mencapai skor indeks paling rendah 95. Untuk itu masih ada selisih 15 point lagi untuk dicapai dalam pembangunan Kota Banda Aceh.

Secara khusus kegiatan perhitungan IKS belum dipahami dengan baik oleh semua pihak, terutama antar aparatur antar OPD. Proses perhitungan ini telah menemukan 51 (42,9 persen) IKD dari OPD di Kota Banda Aceh yang diperhitungkan masih memiliki masalah, yang sebagian besarnya tidak diupdate dan sebagian tidak konsisten. Proses perhitungan IKS yang berkelanjutan diharapkan dapat mengoreksi sejumlah kekurangan tersebut, sehingga perhitungan IKS dapat berkontribusi pada membaiknya SAKIP Kota Banda Aceh.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh merekomendasikan:

- Penting untuk memasukkan nilai/skor IKS menjadi salah satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah, baik jangka pendek (RKP), jangka menengah (RPJM), dan jangka Panjang (RPJP).
- IKS dapat menjadi salah satu bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), bahkan baik jika dapat dikembangkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP).
- Agar mendorong setiap OPD di Kota Banda Aceh untuk memahami bahwa dengan metode yang ada saat ini maka kinerja setiap instansi berkontribusi pada nilai IKS.

FGD IKS Tahun 2022 yang di Laksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang diikuti oleh pengelola data dari berbagai OPD



Rapat Penyampaian Hasil IKS Tahun 2022 Pemerintah Kota Banda Aceh

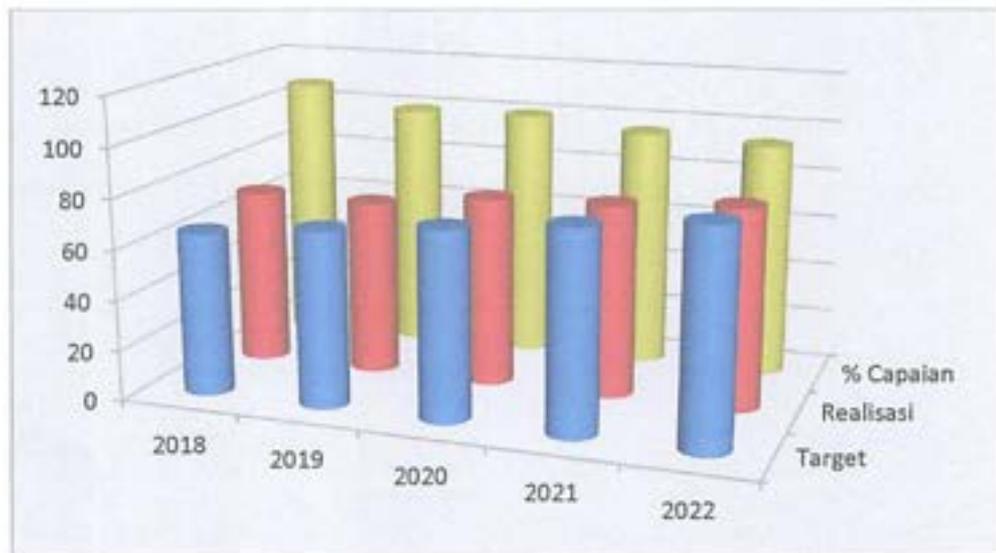


Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengimplementasi pelaksanaan indikator kinerja Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh, namun masih terdapat beberapa kendala sehingga capaian terhadap indikator belum optimal, sehingga menjadi prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam perbaikan kualitas pelaksanaan Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh kedepan. Apabila dikaitkan terhadap target RPJMD hasil penilaian pelaksanaan Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Perkembangan Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh dapat dilihat sebagaimana tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 1 terhadap target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh	Indeks	2018	65	70,2	108,00
			2019	70	69,7	99,57
			2020	75	75,22	100,29
			2021	80	76,77	95,96
			2022	85	79,85	93,94

Grafik 3.1
Target dan Realisasi sasaran strategis 1 terhadap target RPJMD



3.3.2 Sasaran Strategis 2 : "Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan"

Indikator Kinerja, target, realisasi, capaian dan kategori dari sasaran strategis 2 disajikan dalam tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		(%) Capaian	Kategori
			Target	Realisasi		
	Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	%	80	83,21	104,01	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Kinerja					104,01	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis "Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan" dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **104,01**. Keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- ◆ Indikator Kinerja "Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah" yang ditargetkan sebesar 80 dapat direalisasikan sebesar 83,21 dengan persentase tingkat capaian sebesar 104,01% atau mendapat kategori Sangat Baik.

Pencapaian kinerja sasaran Standar Nasional Pendidikan (SNP) tahun 2022 terealisasi 83,21 % dari target 80%, dengan capaiannya sebesar 104,01 %. Hal ini tidak lepas dari standar-standar yang telah ditetapkan didalam pelaksanaan proses Belajar Mengajar di sekolah. Kenaikan ini merupakan akumulasi capaian dari 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dicapai pada kedua jenjang sekolah tersebut. **Realisasi capaian SNP 83,21 % ini merupakan capaian rata-rata SNP Jenjang SD yang mencapai 85,22 % dan Jenjang SMP mencapai 81,21 % yang diakumulasikan lalu dibagi dua.** Secara akumulatif, rata-rata capaian pemenuhan SNP Jenjang SD dan SMP Tahun 2022 untuk masing-masing standar.

Secara umum jenjang SD dan SMP dalam capaian 8 SNP telah tercapai kategori **Menuju SNP 4**, yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan ,
2. Standar Isi,
3. Standar Proses,
4. Standar Penilaian,
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
6. Standar Pengelolaan Pendidikan,dan
7. Standar Pembiayaan.

Ada 1 standar dalam capaian 8 SNP **Menuju SNP 3**, yaitu:

1. Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berdasarkan capaian rapor mutu SD dan SMP seperti dipaparkan di atas, terlihat bahwa untuk tahun 2022 ketercapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh umumnya sudah sangat baik dengan rata-rata capaian **83,21%**. Capaian tertinggi adalah pada komponen Standar Kompetensi Lulusan , SD = 99, 88% dan SMP = 98,17%, rata-rata = 99,00%. Capaian terendah pada komponen Standar Sarana dan Prasarana, SD = 80,72 % , dan SMP 79,93%, = rata-rata = 79,93 %.

Capaian-capaian tersebut merupakan hasil analisis dari Rapor Mutu Sekolah yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk mengatasi peralihan pasca covid-19, maka Pemerintah kota Banda Aceh mengadakan Pelatihan untuk mengingatkan kembali para guru tentang metode pembelajaran yang baik yang menyentuh langsung pada pemberian motivasi anak untuk kembali belajar dengan sempurna karena pada saat pembelajaran daring mempunyai kendala yang beragam. Program Sekolah Penggerak, Organisasi Pengerak dan Guru Penggerak yang telah di tetapkan untuk Pemerintah untuk jenjang TK ada 2 sekolah, jenjang SD 4 sekolah dan jenjang SMP 3 sekolah untuk melaksanakan Kurikulum Merdeka dalam rangka mengejar Loos Learning.

Adapun yang menjadi faktor pendukung terhadap pelaksanaan Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah:

- Ketersediaan Dokumen 1 (KTSP), Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
- Pembiasaan dan Keteladanan di lingkungan sekolah oleh Kepala Sekolah, Guru dan Tenaga kependidikan lainnya.
- Pemberian motivasi, semangat belajar dan tampil yang diberikan dari berbagai pihak (keluarga, guru dan pemerintah).
- Ketersediaan media pendukung yang telah disiapkan sekolah dalam proses belajar mengajar.
- Jumlah pengajar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai bidang studinya.
- Sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar.
- Perekrutan Kepala Sekolah melalui test serta pelatihan-pelatihan bagi pengajar.
- Adanya dana bantuan untuk mendukung kegiatan sekolah.
- Para guru dan murid melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan konsisten.
- Adanya perlombaan yang menjadi motivasi bagi siswa maupun guru dalam mencapai target.
- Adanya penegakan Tata Tertib Sekolah yang berisi kewajiban, hak, larangan/sanksi dan pemberian penghargaan kepada siswa.
- Adanya Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah.

Selain faktor pendukung terhadap pelaksanaan Indikator Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah juga terdapat faktor penghambat terhadap pelaksanaan tersebut yaitu:

- Adanya gangguan Jaringan Internet pada daerah/sekolah tertentu.
- Masih Kurangnya komunikasi antara Komite dan orang tua/wali siswa dalam mengamalkan Pembiasaan dari hasil pembelajaran selama di sekolah kepada siswa selama berada di luar sekolah.
- Masih kurangnya tenaga guru dan adanya tenaga honorer yang tidak sesuai dengan bidang studi yang dibutuhkan.

Berdasarkan dari hasil Aseesmen Nasional (AN) tahun 2021 dengan hasil literasi 1,88 merupakan capaian rata-rata jenjang SD yang mencapai 1,81 dan jenjang SMP mencapai 1,95 yang diakumulasikan lalu dibagi dua diatas rata-rata capaian provinsi 1,61, dan capaian nasional 1,69. Sementara hasil capaian numerasi 1,66 merupakan capaian rata-rata jenjang SD yang mencapai 1,59 dan jenjang SMP mencapai 1,74 yang diakumulasikan lalu dibagi dua diatas rata-rata capaian provinsi 1,55, dan capaian nasional 1,59 (sumber rapor pendidikan Kota Banda Aceh).

Tabel 3.10
Data Dukung Rapor Pendidikan dari Kemendikbud

Jenjang Satuan Pendidikan	Nama Indikator	Nilai Kabupaten/Kota	Perbandingan		
			Kab/Kota serupa di nasional	Rata-Rata di provinsi	Rata-Rata di nasional
SD	Kemampuan literasi	1,81	1,8	1,6	1,68
SD	Kemampuan numerasi	1,59	1,61	1,49	1,54
SMP	Kemampuan literasi	1,95	1,87	1,62	1,7
SMP	Kemampuan numerasi	1,74	1,73	1,6	1,64
SD dan SMP	Kemampuan literasi	1,88	1,84	1,61	1,69
SD dan SMP	Kemampuan numerasi	1,67	1,67	1,55	1,59

(Sumber Rapor Pendidikan Kemendikbud)

Note:

Capaian AN SD dan SMP

Literasi : 1,88

Numerasi : 1,67

Interval 1 – 3

Di atas kompetensi minimum	2,10 – 3,0
Mencapai kompetensi minimum	1,80 – 2,09
Di bawah kompetensi minimum	1,40 – 1,79
Jauh di bawah	1,0 - 1,39



**MERDEKA
BELAJAR**

Mengenal Rapor Pendidikan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengembangkan platform Rapor Pendidikan yang menyediakan data evaluasi sistem pendidikan yang berorientasi pada mutu dan capaian hasil belajar satuan pendidikan dan daerah secara komprehensif.



Data mutu dan capaian hasil belajar dari satuan pendidikan pada Rapor Pendidikan terdiri dari lima dimensi, antara lain:

- A. Mutu dan relevansi hasil belajar
- B. Pemerataan pendidikan yang bermutu
- C. Kompetensi dan kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)
- D. Mutu dan relevansi pembelajaran
- E. Pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel



Pengguna Rapor Pendidikan

- Kepala sekolah
- Tenaga pendidik yang ditunjuk
- Dinas pendidikan setempat

Manfaat Rapor Pendidikan

1. Referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan
2. Sumber data yang objektif dan andal dengan penyajian laporan secara otomatis dan terintegrasi
3. Instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan baik untuk evaluasi internal maupun eksternal
4. Alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar (output)
5. Satuan pendidikan tidak perlu menggunakan beragam aplikasi sehingga diharapkan dapat meringankan beban administrasi dengan penyajian data yang terpusat
6. Satu-satunya platform untuk melihat hasil Asesmen Nasional

Kunjungi Pusat Bantuan pada platform Rapor Pendidikan untuk informasi lebih lanjut.

raporpendidikan.kemdikbud.go.id



Apa keuntungan menggunakan Rapor Pendidikan?

Rapor Pendidikan dapat dijadikan sebagai:

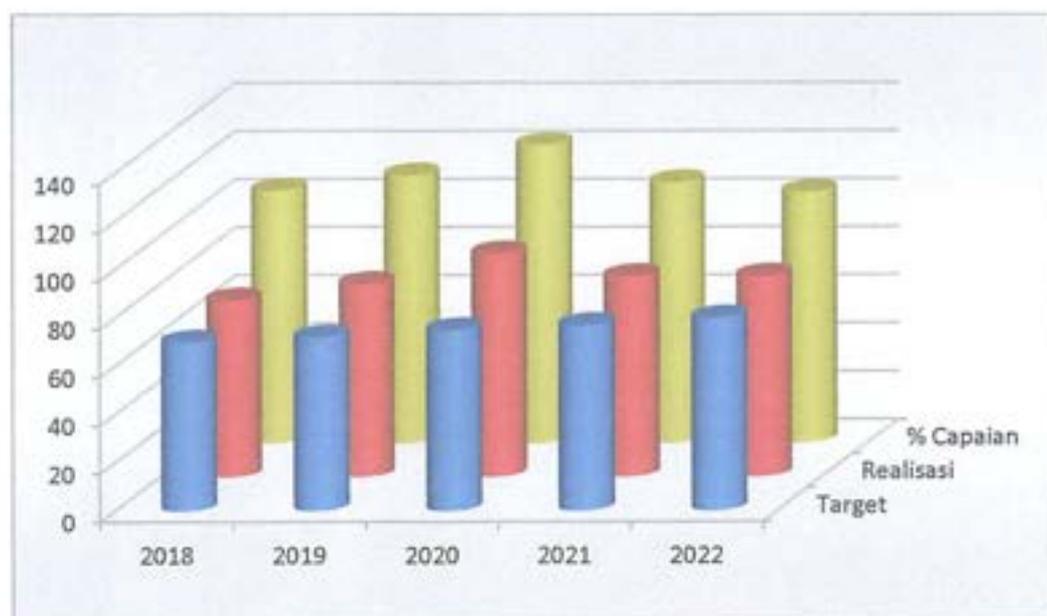
1. Referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan,
2. Satu-satunya platform untuk melihat hasil Asesmen Nasional,
3. Sumber data yang objektif dan andal di mana laporan disajikan secara otomatis dan terintegrasi,
4. Instrumen pengukuran untuk evaluasi sistem pendidikan secara keseluruhan baik untuk evaluasi internal maupun eksternal,
5. Alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemerataan hasil belajar (output),
6. Platform penyajian data yang terpusat. Satuan pendidikan tidak perlu menggunakan beragam aplikasi sehingga diharapkan dapat meringankan beban administrasi.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengimplementasi pelaksanaan indikator kinerja Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah, dalam pelaksanaan adanya faktor pendukung dan faktor penghambat serta langkah perbaikan dalam pelaksanaan indikator tersebut, sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh menjadikan prioritas terhadap perbaikan kualitas pelaksanaan indikator kinerja Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah kedepan. Apabila dikaitkan terhadap target RPJMD hasil penilaian pelaksanaan indikator kinerja Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah cenderung melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga persentase capaian dalam ketegori sangat baik dari tahun ke tahun. Perkembangan Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah dapat dilihat sebagaimana tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 terhadap target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	%	2018	70	73,31	109,01
			2019	72	79,93	111,01
			2020	75	92,73	123,64
			2021	77	83,21	108,06
			2022	80	83,21	104,01

Grafik 3.2
Realisasi dan Target Sasaran Strategis 2 terhadap target RPJMD



3.3.3 Sasaran Strategis 3 : “Peningkatan Kesejahteraan masyarakat”

Indikator Kinerja, target, realisasi, capaian dan kategori dari sasaran strategis 3 disajikan dalam tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		(% Capaian	Kategori
			Target	Realisasi		
	Angka Kemiskinan	Jiwa	18,263	19,900	91,04	Cukup
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,68	8,62	48,24	
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	100	59,36	59,36	
					66,21	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis “Peningkatan Kesejahteraan masyarakat” dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan **Cukup** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **66,21**. Keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

3.3.3.1 Angka Kemiskinan

- ◆ Indikator Kinerja “Angka Kemiskinan” yang ditargetkan sebesar 18,263 dapat direalisasikan sebesar 19,900 dengan persentase tingkat capaian sebesar 91,04% atau mendapat kategori Baik.

Tabel 3.13
Realisasi Indikator Kinerja Angka Kemiskinan sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		(% Capaian	Kategori
			Target	Realisasi		
	Angka Kemiskinan	Jiwa	18,263	19,900	91,04	Baik

Tahun 2022 merupakan tahun dimana Pemerintah telah menetapkan status Pandemi Covid-19 menjadi *endemi covid*, dimana pengaruh kebijakan pemerintah mulai beradaptasi menuju *new normal*. Namun demikian efek pandemi masih mempengaruhi ekonomi dan sosial di

masyarakat Kota Banda Aceh. Aktivitas masyarakat terpengaruh oleh regulasi yang mengatur kegiatan sosial dan ekonomi, meskipun status *endemi* telah ditetapkan namun Pemerintah Kota masih melakukan tindakan dalam mengendalikan penyebaran virus di masyarakat. Salah satu dampaknya adalah terganggunya kehidupan sosial ekonomi, terutama masyarakat miskin dan rentan sehingga jumlah kemiskinan mengalami lonjakan. Opsi intervensi kebijakan yang berorientasi peningkatan pendapatan menjadi sangat terbatas. Pelatihan dan pendampingan usaha kecil berkurang frekuensi dan jumlah pesertanya, sehingga berdampak pada cakupan jumlah penduduk miskin di Kota Banda Aceh, berikut data jumlah penduduk miskin kabupaten/kota dalam provinsi Aceh terlihat pada tabel 3.14:

Tabel 3.14
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh

<i>Kabupaten/Kota</i>	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
<i>Simeuleu</i>	17.860	18,37
<i>Aceh Singkil</i>	24.330	19,18
<i>Aceh Selatan</i>	30.780	12,43
<i>Aceh Tenggara</i>	28.420	12,83
<i>Aceh Timur</i>	62.160	13,91
<i>Aceh Tengah</i>	31.500	14,5
<i>Aceh Barat</i>	38.460	17,93
<i>Aceh Besar</i>	58.180	13,38
<i>Pidie</i>	85.870	18,79
<i>Bireuen</i>	60.290	12,51
<i>Aceh Utara</i>	107.020	16,86
<i>Aceh Barat Daya</i>	24.000	15,44
<i>Gayo Lues</i>	18.090	18,87
<i>Aceh Tamiang</i>	38.250	12,61
<i>Nagan Raya</i>	29.630	17,38
<i>Aceh Jaya</i>	12.130	12,51
<i>Bener Meriah</i>	27.930	18,39
<i>Pidie Jaya</i>	30.410	18,45
<i>Banda Aceh</i>	19.900	7,13
<i>Sabang</i>	5.140	14,66
<i>Langsa</i>	19.410	10,64
<i>Lhokseumawe</i>	23.030	10,84
<i>Subulussalam</i>	14.060	16,94

Sumber: BPS Aceh, 2023 (Status bulan Maret 2022)

Angka Kemiskinan di Kota Banda Aceh merupakan nilai terendah jika dibandingkan dengan kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh, yaitu sebesar 7,13%, angka tertinggi persentase kemiskinan terdapat di Kabupaten Singkil yaitu sebesar 19,18%.

Angka kemiskinan di Kota Banda Aceh mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 20.950 jiwa pada tahun 2021 menjadi 19.900 jiwa pada tahun 2022. Secara kuantitatif angka kemiskinan di Kota Banda Aceh terjadi penurunan sebanyak 1.050 jiwa (0,48%). Meskipun demikian angka tersebut belum mencapai target Pemerintah Kota Banda Aceh yaitu sebesar 18,263 jiwa.

Permasalahan dan penanganan Angka kemiskinan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat dimana salah satu aspek adalah harga komoditi makanan khususnya Sembako yang mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan biaya energi (BBM dan listrik), dan biaya perumahan.

Terjadinya perubahan kenaikan biaya tersebut tidak lepas dari perubahan dan dinamika ekonomi dunia dan krisis energi yang terjadi sepanjang tahun 2022.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya mengoptimalkan SPM bidang Sosial melalui program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, dan Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan total anggaran 5,4 Milyar. Optimalisasi SPM tersebut diharapkan dapat meringankan beban kelompok miskin dan mengintervensi pemberdayaan social masyarakat. Capaian SPM bidang Sosial Kota Banda Aceh pada triwulan IV tercatat sebesar 97,78%.berikut rekapitulasi capaian SPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.16

REKAPITULASI CAPAIAN SPM KABUPATEN/KOTA DI ACEH TAHUN 2022

berdasarkan update pada Website <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>

Update : 9 Januari 2023, pkl 11.00 WIB

NO	KAB/KOTA	CAPAIAN TRIWULAN IV						RATA-RATA CAPAIAN
		PEND	KES	PU	PERA	TRANTIB	SOSIAL	
1	ACEH JAYA	94.40%	100.00%	100.00%	100.00%	77.39%	99.92%	95.29%
2	ACEH BESAR	99.12%	75.83%	100.00%	100.00%	96.16%	84.99%	92.69%
3	ACEH UTARA	97.06%	77.10%	100.00%	100.00%	96.67%	84.00%	92.47%
4	NAGAN RAYA	97.23%	82.39%	74.87%	98.33%	99.78%	99.93%	92.09%
5	PIDIE JAYA	93.92%	58.72%	100.00%	100.00%	99.62%	96.00%	91.36%
6	ACEH BARAT	98.35%	89.21%	73.02%	100.00%	90.85%	90.74%	90.36%
7	BENER MERIAH	100.00%	100.00%	82.56%	100.00%	90.80%	66.66%	90.00%
8	SABANG	100.00%	64.04%	85.53%	100.00%	98.44%	89.94%	89.66%
9	GAYO LUES	90.92%	94.44%	100.00%	100.00%	47.19%	96.74%	88.22%
10	BIREUEN	79.30%	78.25%	73.79%	93.33%	93.40%	100.00%	86.35%
11	ACEH TENGGARA	93.14%	80.12%	98.33%	72.81%	72.59%	100.00%	86.17%
12	PIDIE	99.88%	27.46%	95.00%	100.00%	87.40%	100.00%	84.96%
13	ACEH BARAT DAYA	97.80%	82.48%	25.88%	100.00%	100.00%	96.45%	84.10%
14	SIMEULUE	91.44%	57.71%	62.67%	100.00%	92.11%	95.23%	83.19%
15	BANDA ACEH	87.89%	65.56%	74.89%	100.00%	64.59%	97.78%	81.79%
16	ACEH TIMUR	62.15%	72.09%	74.34%	87.50%	92.60%	100.00%	81.45%
17	ACEH SELATAN	86.96%	71.86%	95.83%	100.00%	71.56%	47.73%	78.99%
18	ACEH TENGAH	97.42%	84.31%	82.15%	100.00%	100.00%	1.70%	77.93%
19	LHOKSEUMAWE	100.00%	40.91%	56.34%	84.18%	100.00%	99.66%	76.85%
20	LANGSA	90.60%	64.77%	56.72%	60.56%	99.47%	81.93%	75.68%
21	ACEH SINGKIL	72.26%	62.76%	34.26%	96.67%	91.69%	83.68%	73.55%
22	SUBULUSSALAM	0.01%	37.28%	81.43%	82.09%	71.22%	74.28%	61.05%
23	ACEH TAMIANG	63.09%	84.39%	56.16%	50.00%	59.02%	50.69%	60.56%

Ditolah : Bina Perm-Otaha

Intervensi melalui kebijakan Pemerintah berorientasi meringankan beban pengeluaran keluarga miskin tetap dilaksanakan, misalnya penyaluran bantuan masa panik untuk 94 Kepala Keluarga (905 jiwa) sepanjang tahun 2022 bagi korban bencana alam dan kebakaran, selanjutnya bantuan santunan kematian bagi warga Kota Banda Aceh, dimana sepanjang tahun 2022 sebanyak 497 santunan telah disalurkan.



Penyerahan bantuan korban bencana kebakaran



Penyerahan bantuan alat bantu kursi roda



Penyerahan bantuan korban bencana kebakaran



Pemulangan Lansia terlantar ke Sumatera Utara

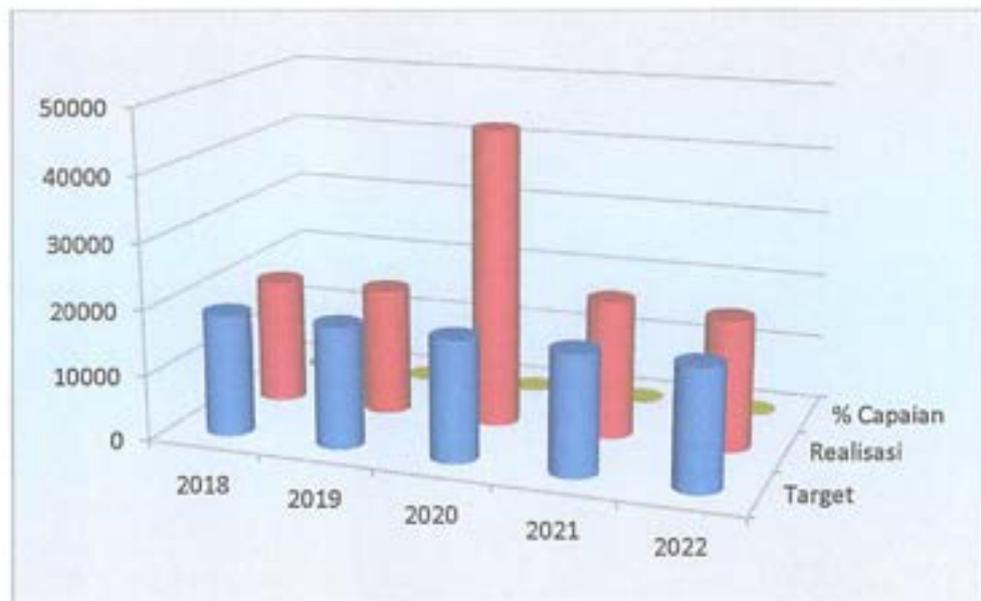
Realisasi dan Target indikator kinerja Angka kemiskinan per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.17:

Tabel 3.17
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka kemiskinan terhadap target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Angka Kemiskinan	Jiwa	2018	18,621	19,120	97,39
			2019	18,531	19,357	95,73
			2020	18,442	45,323	40,69

		2021	18,352	20,950	87,60
		2022	18,263	19,900	91,04

Grafik 3.4
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Angka kemiskinan terhadap target RPJMD



3.3.3.2 Tingkat pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis "Peningkatan Kesejahteraan masyarakat" dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja **Tingkat pengangguran Terbuka** dikategorikan **Kurang** dengan persentase capaian sebesar **48,24**. Keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencapai indikator kinerja ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- ◆ Indikator Kinerja "Tingkat pengangguran Terbuka" yang ditargetkan sebesar 5,68 dapat direalisasikan sebesar 8,62 dengan persentase tingkat capaian sebesar 48,24% atau mendapat kategori Kurang seperti yang tersaji dalam tabel 3.18:

Tabel 3.18
Realisasi Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Sasaran 3 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		(% Capaian	Kategori
			Target	Realisasi		
1.	Tingkat pengangguran terbuka	%	5,68	8,62	48,24	Kurang

Pengangguran merupakan penyakit ekonomi yang sangat mempengaruhi laju perkembangan ekonomi suatu bangsa. Faktor utama Pengangguran disebabkan ketersediaan lapangan kerja yang sedikit sedangkan supply angkatan kerja yang memasuki lapangan kerja setiap tahun terus bertambah. Hal ini tentu terjadi gap yang menyebabkan terjadi pengangguran. Disamping itu penyebab pengangguran di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kemampuan, keterampilan, dan keinginan belajar para pencari pekerjaan yang tidak siap memenuhi kualifikasi yang diinginkan oleh perusahaan. Perlu dijadikan catatan karena penyebab pengangguran di Indonesia juga dipengaruhi teknologi yang menuntut pencari kerja lebih terampil.

Provinsi Aceh dengan ibukota Banda Aceh menjadi pusat perekonomian dan pendidikan penduduk Provinsi Aceh yang terus berkembang dalam melakukan pembangunan ekonomi di berbagai sektor. Pengangguran yang menjadi permasalahan pada berbagai daerah di Indonesia dialami juga oleh Kota Banda Aceh. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Banda Aceh diawal kepemimpinan Walikota Aminullah Usman, SE, Ak, MM dan Drs. H. Zainal Arifin tahun 2017 mencapai 7,75% dan tahun 2018 menurun sebesar 7,29%. Pada tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka kembali menurun menjadi 6,92%.

Dengan semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional pasca pandemi Covid 19 menyebabkan ikut sertanya membaiknya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mencapai yaitu 5,53% jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai minus 3,39. Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik ini membawa efek terhadap penurunan angka pengangguran di Kota Banda Aceh pada tahun 2022 TPT menjadi 8,62%. Jika dibandingkan dengan TPT tingkat Provinsi Aceh tahun 2022 yang berada pada angka 6,17%, tentunya TPT Kota Banda Aceh masih diatas rata rata TPT Provinsi Aceh. Hal ini tidak terlepas Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh menjadi magnet tersendiri bagi penduduk Aceh yang berada diberbagai kabupaten/kota untuk mencari pekerjaan dan keberuntungan di Kota Banda Aceh yang merupakan pusat perekonomian Provinsi Aceh.

Selanjutnya tabel dibawah ini dapat dilihat perkembangan angka pengangguran terbuka (TPT) kota Banda Aceh sebagai berikut:

TABEL 3.19**PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA 2018-2022**

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)
2018	7,35	7,29
2019	6,55	6,92
2020	6,95	9,54
2021	6,08	8,94
2022	5,68	8,62

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, 2022

Grafik 3.5

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banda Aceh, 2022

Penurunan angka pengangguran di Kota Banda Aceh tahun 2022 mencapai 0,96% dibandingkan tahun 2021, tentu tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Banda Aceh terus membenahi diri dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil pasca Pandemi Covid 19

yang sangat memukul aktifitas ekonomi di Kota Banda Aceh. Untuk mengurangi angka pengangguran yang menjadi problem serius setiap daerah maka Pemerintah Kota Banda Aceh terus memacu pembangunan di sektor formal dan informal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimana diharapkan pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat menurunkan angka pengangguran. Pembangunan disektor riil yang merupakan sektor yang pembangunan ekonomi yang bersentuhan dengan perekonomian masyarakat secara langsung seperti pembinaan UMKM dan industri kecil, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pasar, kemudahan dalam perizinan usaha membuat pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh secara perlahan kembali pulih.

Disamping itu untuk mencetak tenaga kerja terampil yang siap dipasar kerja pemerintah kota Banda Aceh bekerjasama dengan berbagai pihak seperti dengan UPTB BLK Kementerian RI dan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Provinsi Aceh setiap tahun melakukan pembinaan ketrampilan bagi pencari kerja supaya mempunyai ketrampilan. Pelatihan ketrampilan ini dilakukan pada UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Lamjabat Kota Banda Aceh seperti pelatihan ketrampilan menjahit dasar, montir sepeda motor, pengelasan, perbaikan mesin pendingin, pembuatan kue dan roti, tata rias dan sebagainya. Diharapkan pencari kerja ini mempunyai modal ketrampilan untuk berwirausaha. Selain itu pembinaan Bursa Kerja Khusus (BKK) di sekolah kejuruan, penempatan tenaga kerja yang terdaftar terus dilakukan untuk mempertemukan antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan. Pada Tahun 2022 pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Banda Aceh yang berhasil ditempatkan sebanyak 48 orang (44,86%) yang ditempatkan pada berbagai perusahaan yang ada di Kota Banda Aceh.

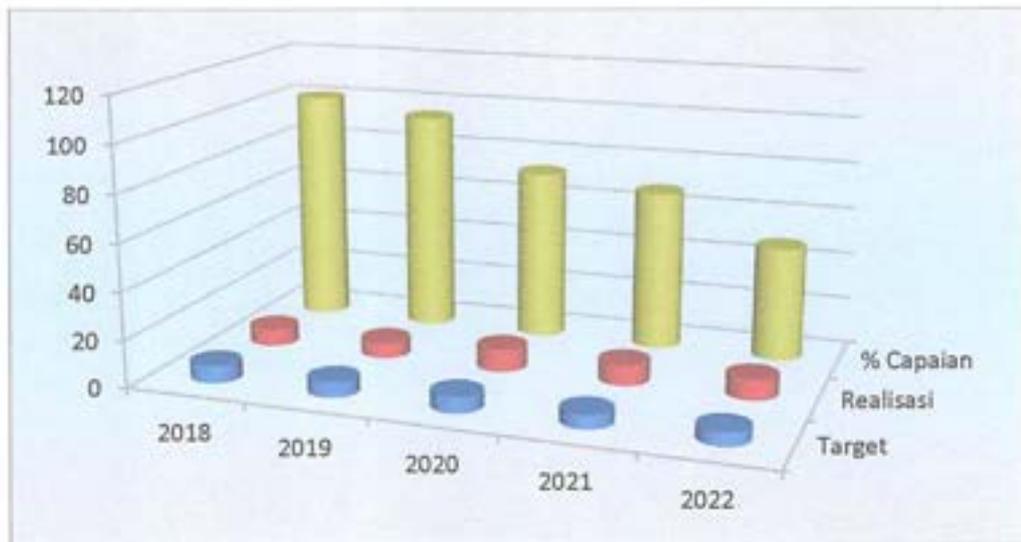
Realisasi dan Target indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.20:

Tabel 3.20
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Tingkat pengangguran terbuka	%	2018	7,35	7,29	100,82
			2019	6,55	6,92	94,65
			2020	6,95	9,54	72,85
			2021	6,08	8,94	68,01
			2022	5,68	8,62	48,24

GRAFIK 3.6

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap target RPJMD



Berikut ini adalah foto foto kegiatan yang dilakukan oleh Dinas tenaga Kerja Kota Banda Aceh dalam mengurangi angka pengangguran.



Pelatihan Tata Rias Pengantin



Pelatihan Tata Rias Pengantin



Pelatihan Tehnik Arsitektur dan Juru Gambar



Pelatihan Tehnik Arsitektur dan Juru Gambar



Pelatihan Autocad 2 Dimensi



Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue



Pelatihan Pengelasan SMAW posisi 2G



Pelatihan Pengelasan SMAW posisi 2G

3.3.3 Persentase Peningkatan Nilai Investasi

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis "Peningkatan Kesejahteraan masyarakat" dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Persentase Peningkatan Nilai Investasi dikategorikan Cukup dengan persentase capaian sebesar 59,36. Keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencapai indikator kinerja ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

◆ Indikator Kinerja "Persentase Peningkatan Nilai Investasi" yang ditargetkan sebesar 100 dapat direalisasikan sebesar 8,62 dengan persentase tingkat capaian sebesar 59,26% atau mendapat kategori Cukup seperti yang tersaji dalam tabel 3.21:

Pelatihan montir sepeda motor



Pelatihan montir sepeda motor



Pelatihan Pengolahan ikan



Pelatihan menjahit pakelan dengan mesin



Tabel 3.21

Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Sasaran 3 Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja Utama	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian%
1	2	3	4	5
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	100%	Rp 433.879.479.095,- (59,36 %)	59,36%

Peningkatan nilai Investasi Pada Tahun 2018 s/d tahun 2022 capaian nilai akumulasi realisasi investasi berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan oleh investor/pelaku usaha melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal Online (LKPM-Online) yaitu sebesar Rp. 2.055.936.088.168,- Sedangkan pada tahun 2022 berjumlah Rp.433.879.479.095,- yang terbagi dari 7 subsektor unggulan seperti terlihat pada tabel 3.22 :

Tabel 3.22

Realisasi Investasi Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2022
Per- Sektor Usaha

No	7 Sektor	Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan III (Rp)	Triwulan IV (Rp)	Total (Rp)	%
1	Kehutanan, Perikanan, Pertambangan, Perkebunan, dan Peternakan	-	38.000.000	925.000.000	851.500.000,00	1.814.500.000,00	0.14
2	Jasa Lainnya	1.000.345.000,00	22.314.446.961	9.367.698.064	6.519.659.300,00	39.202.149.325,00	46.59
3	Konstruksi	1.514.500.000,00	144.483.298.665	3.890.168.341	7.356.100.000,00	157.244.067.006,00	6.63
4	Listrik, Gas dan Air	50.000.000,00	3.417.597.505	6.079.250	20.000.000,00	3.493.676.755,00	0.70
5	Perdagangan dan Reparasi	10.143.515.886,00	43.741.653.434	6.212.262.721	10.825.314.741,00	70.922.746.782,00	9.32
6	Transportasi, Gudang	6.494.930.419,00	94.050.000	102.992.994.951	3.925.000.000,00	113.506.975.370,00	36.54
7	Telekomunikasi Industri	-	43.921.438.293	848.264.172	2.925.661.392,00	47.695.363.857,00	0.07
Jumlah		19.203.291.305	258.010.484.858,00	124.242.467.499,00	32.423.235.433,00	433.879.479.095,00	100,0

Adapun capaian nilai realisasi dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Nilai Investasi dasar 2017	: Rp 118.166.350.000,- / (0 %)
Nilai Investasi tahun akhir 2022	: Rp 650.000.000.000,- / (100 %)
Target Kinerja 2022	: Rp 133.000.000.000,- / (100%)
Realisasi nilai investasi 2018 s/d 2022	: Rp. 2.055.936.088.168,-
Persentase Capaian Kinerja Tahun 2022:	59.36 %

Persentase capaian kinerja tahun 2022 adalah sebesar 59.36 %. Nilai ini didapat dari persenan hasil realisasi investasi tahun 2022 (59.36%) dibagi persenan target realisasi investasi tahun 2022 (100%). Sehingga diperoleh nilai sebesar 59.36%.

Adapun rincian perhitungan persentase nilai realisasi investasi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

$$P = \frac{I^n - I^d}{I^n - I^a} \times 100\%$$
$$P = \frac{433.879.479.095 - 118.166.350.000}{650.000.000.000 - 118.166.350.000} \times 100\%$$
$$P = \frac{315.713.129.095}{531.833.650.000} \times 100\%$$
$$P = 0.5936 \times 100 \%$$
$$P = 59.36 \%$$

Keterangan:

- P = Persentase realisasi investasi
- Iⁿ = Realisasi Nilai Investasi tahun berjalan
- I^d = Realisasi Nilai Investasi tahun dasar
- I^a = Target Realisasi Nilai Investasi tahun akhir

Untuk mencari Persentase Capaian Kinerja Tahunan 2022 :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{persenan dari realisasi}}{\text{persenan target}} \times 100\%$$
$$\text{Capaian} = \frac{59.36}{100} \times 100\% = 59.36\%$$

Persentase capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 59.36%. Nilai capaian ini lebih rendah dibandingkan persentase capaian pada tahun 2021 sebanyak 107.73%. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2022 setiap daerah/kabupaten belum bisa mengupload data secara keseluruhan. Sehingga data realisasi yang diperoleh saat ini adalah hanya data realisasi yang masuk dalam katagori wewenang daerah saja.

Untuk capaian nilai realisasi investasi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 dengan tahun 2022 (yoy) terjadi penurunan nilai realisasi investasi sebesar -20.8% (114.002.690.612) Dimana nilai realisasi investasi pada tahun 2021 sebesar Rp. 547.882.169.707 dan pada Tahun 2022 sebesar Rp. 433.879.479.095,-

Dapat dilihat pada tabel berikut rincian capaian realisasi nilai investasi dari Tahun 2018 s/d tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.23
Persentase Peningkatan Nilai Investasi secara Tahunan

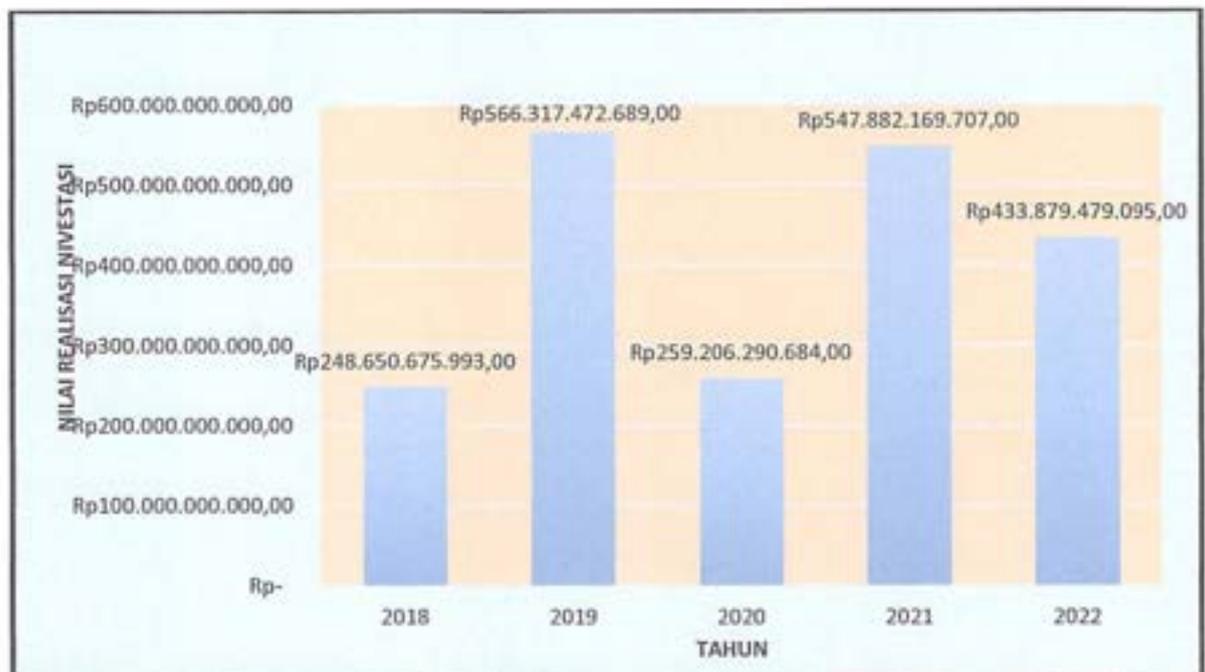
NO	TAHUN	JUMLAH INVESTOR		PENINGKATAN NILAI INVESTASI		PERSENTASE	
		TARGET	REALISASI	TARGET THN	REALISASI THN	TARGET THN	REALISASI
1.	2018	22	82	79.833.650.000,-	248.650.675.993	15	24,53
2.	2019	40	87	53.000.000.000,-	566.317.472.689,-	25	84,27
3.	2020	80	806	133.000.000.000,-	259.206.290.684,-	50	26,52
4.	2021	120	1078	133.000.000.000,-	547.882.169.707,-	75	80,80
5.	2022	160	647	133.000.000.000,-	433.879.479.095	100	59,36

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa selama 5 tahun periode berjalan nilai realisasi investasi sangat berfluktuatif. Terjadinya kenaikan peningkatan persentase realisasi investasi dari tahun 2018 sebesar 24,53% ke tahun 2019 sebesar 84,27% dan di tahun 2020 terjadi penurunan kembali sebesar 26,52 % yang disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan melemahnya tingkat pertumbuhan perekonomian di Kota Banda Aceh, dimana pada saat itu terjadi investasi mangkrak yang berasal dari perusahaan besar yang sedang berinvestasi di Kota Banda Aceh namun terhenti karena pandemi Covid-19, namun pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali nilai realisasi investasi sebesar 80,80%, walaupun

kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 59.36% yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab penurunan dimaksud.

Adapun grafik realisasi investasi dari tahun ke tahun dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.7
REALISASI INVESTASI KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2018 S/D 2022



Total Realisasi Investasi akumulasi dari tahun 2018 s/d 2022 sejumlah Rp.2.055.936.088.168,- Milyar dari target Rp. 650.000.000.000,- (75%)

Ada beberapa faktor yang berdampak terhadap Peningkatan dan Penurunan Nilai Investasi, diantaranya seperti uraian berikut ini :

1. Faktor Penghambat Peningkatan Realisasi Investasi

- Realisasi investasi dapat berjalan lancar bila didukung dengan adanya kepastian regulasi atau kebijakan dari pemerintah. Karena regulasi yang belum mendukung dan memberikan kepastian hukum bagi para investor menjadi alasan utama bagi mereka untuk enggan berinvestasi di Kota Banda Aceh.

- b. Kurangnya promosi investasi terkait daya tarik iklim usaha dan investasi di Kota Banda Aceh pada level-level Nasional dan daerah.
- c. Kurangnya kajian terhadap lahan-lahan investasi yang tersedia di Kota Banda Aceh arah strategi tumbuhnya investasi baru tidak terjabarkan secara signifikan yang menyebabkan kualitas penyebaran investasi menjadi sangat rendah.
- d. Infrastruktur untuk eksekusi investasi besar belum mendukung, seperti kapasitas listrik dan air yang belum mencukupi.
- e. Masih kurangnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang trampil dan berdaya saing.
- f. Lemahnya kegiatan pemantauan penanaman modal dari pemerintah kepada para investor yang mengakibatkan terjadi penurunan kesadaran dan pemahaman bagi investor/pelaku usaha mengenai kebijakan penanaman modal dan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal secara daring melalui lkpm-online.
- g. Masalah indikator makro ekonomi yang belum sepenuhnya pulih (contohnya inflasi, suku bunga, nilai tukar). Namun penyebab utama investor asing yang hengkang dari Indonesia, karena iklim investasi di tanah air yang tidak kondusif, daya saing yang lemah, dan kepastian hukum yang belum maksimal.

2. Faktor Pendorong Peningkatan Realisasi Investasi

- a. Dengan adanya sistim aplikasi perizinan secara online yang saat ini disebut dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), maka lebih mempermudah bagi pelaku usaha untuk mengurus dan mendapatkan izin usahanya serta melaporkan rencana dan realisasi investasi secara daring melalui aplikasi tersebut.
- b. Sebuah investasi, baik asing maupun dalam negeri, harus dapat memberikan manfaat bagi UMKM dan masyarakat lokal serta pengusaha daerah untuk mengambil bagian dalam investasi tersebut, oleh karenanya diperlukan peningkatan kemitraan investasi dari perusahaan besar dengan UMKM dalam rangka peningkatan investasi dalam negeri.
- c. Setiap investasi membutuhkan permodalan yang sangat besar, untuk itu pemerintah harus dapat mendorong akses permodalan yang mudah bagi investor/pelaku usaha untuk mendukung peningkatan investasi yang lebih baik lagi.
- d. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi tingkat kebutuhan investasi.

3. Faktor Strategis yang di Lakukan (Solusi) Terhadap Peningkatan Realisasi Investasi

- a. Perlunya peningkatan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Perlunya penyediaan regulasi/kebijakan yang mendukung investasi dalam rangka peningkatan terhadap kemudahan berusaha (ease of doing business) dan kemudahan iklim investasi serta peningkatan strategi promosi terhadap lahan-lahan dan peluang investasi yang ada di Kota Banda Aceh.
- c. Membangun kemitraan antara investor besar (baik PMA maupun PMDN) dengan pengusaha UMKM, dimana perusahaan besar wajib bermitra dengan UMKM setempat, sebagai dasar nantinya untuk mendapatkan fasilitas insentif dan kemudahan berusaha dari Pemerintah Kota Banda Aceh.
- d. Perlunya peningkatan kebijakan beberapa sektor industri khusus yang memiliki potensi PAD dan penyerapan tenaga kerja yang besar.

Perlunya peningkatan kebijakan beberapa sektor industri khusus yang memiliki potensi PAD dan penyerapan tenaga kerja yang besar.

Tabel 3.24**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Nilai Investasi sasaran 3 terhadap target RPJMD**

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	2018	15	24,53	163,53
			2019	25	84,27	337,08
			2020	50	26,52	53,04
			2021	75	80,80	107,73
			2022	100	59,36	59,36

Grafik 3.8

Realisasi dan Target Indikator Kinerja
Persentase Peningkatan Nilai Investasi
Sasaran 3 terhadap target RPJMD

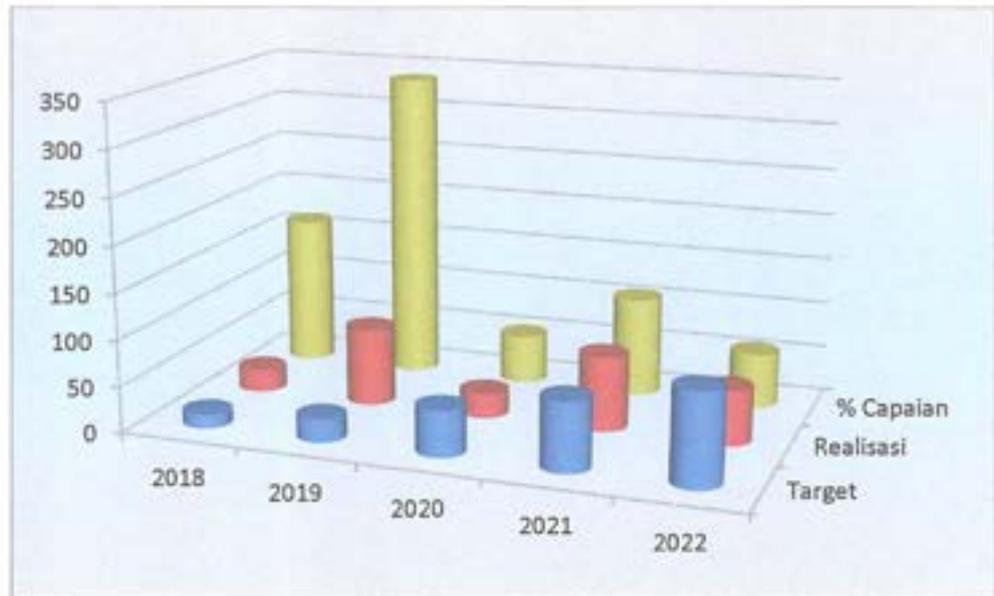


FOTO KEGIATAN PEMANTAUAN PENANAMAN MODAL



Tim Pengawas Penanaman Modal sedang memberikan Pembina pada **PT. ROSNATI (RS.PERTAMEDIKA)** Tanggal 23 Maret 2022



Tim Pemantauan sedang memberikan Pembinaan dan Pengarahan LKPM pada **PT. DIPO INTERNATIONAL PAHALA OTOMOTIF** (Tanggal 30/3/2022)

Tim Pemantauan sedang melakukan Pembinaan untuk Pengisian LKPM Koperasi Produsen Inovasi Nilam Aceh Tanggal 07 April 2022

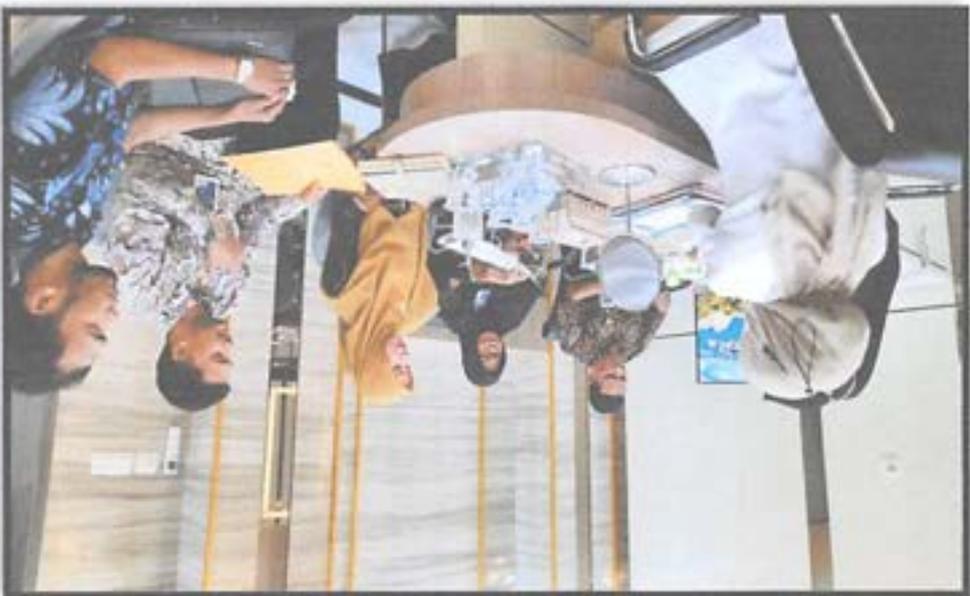


Foto bersama Tim Pembinaan dan Pengarahan Pengisian LKPM pada CV ATHENA ACEH pada Tanggal 14/10/2022





Tim Pengawas Penanaman Modal sedang memberikan Pembina pada PT.INDOMARKO PRISMATAMA Tanggal 21 Maret 2022



Tim Pengawas Penanaman Modal dan sedang memberikan arahan Kepada pelaku usaha di KING GYM pada Tanggal 16 Maret 2022

3.3.4 Sasaran Strategis 4 : "Meningkatnya Indeks keluarga Sehat"

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis "Meningkatnya Indeks keluarga Sehat" dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja **Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi** dikategorikan **Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **90**. Keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- ◆ Indikator Kinerja "Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi" yang ditargetkan sebesar 0,90 dapat direalisasikan sebesar 0,81 dengan persentase tingkat capaian sebesar 90% atau mendapat kategori Baik sebagaimana disajikan dalam tabel 3.25:

Tabel 3.25
Realisasi Indikator Sasaran 4 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		(% Capaian	Kategori
			Target	Realisasi		
1.	Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	Indeks	0,90	0,81	90	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja					90	

Untuk mengukur sasaran keempat digunakan satu indikator Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi Tahun 2022 terealisasi 0,81 dari target 0,90 Capaian Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi Tahun 2022 sedikit menurun dibandingkan capaian persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi Tahun 2021 yang terealisasi sebesar 0,82 dengan target 0,80.

Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi diperoleh dari aplikasi Keluarga Sehat di halaman <https://keluargasehat.kemkes.go.id/>, kondisi capaian IKS Kota Banda Aceh sampai dengan 31 Desember 2022.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah proporsi keluarga sehat dibagi jumlah seluruh keluarga di wilayah tertentu yang besarnya berkisar antara 0-1. IKS ini dipengaruhi oleh 12 indikator. Sampai tanggal 31 Desember 2022 hasil capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel 3.26 sebagai berikut:

Tabel 3.26
 Capaian Indikator Keluarga Sehat Kota Banda Aceh Tahun 2022
 Berdasarkan Aplikasi

No	Indikator	Target Nasional	% Cakupan Kota Banda Aceh
1	Keluarga mengikuti program KB *)	65,00%	83,53%
2	Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	99,44%
3	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *)	100%	96,46%
4	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	100%	96,22%
5	Pertumbuhan Balita dipantau	100%	95,99%
6	Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	100%	69,30%
7	Penderita hipertensi yang berobat teratur	100%	70,76%
8	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	100%	81,70%
9	Anggota keluarga tidak ada yang merokok *)	70,00%	80,79%
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	100%	99,60%
11	Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	100%	99,76%
12	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	100%	99,76%
Indeks Keluarga Sehat (IKS)			0,81

Sumber Data : Aplikasi Keluarga Sehat (Kementerian Kesehatan) Tahun 2022

Indeks Keluarga Sehat (IKS) dibagi menjadi 3 tingkatan yaitu:

- ❖ >0,80 : Keluarga Sehat
- ❖ 0,50-0,80 : Keluarga Pra-Sehat
- ❖ <0,50 : Keluarga Tidak Sehat

Adapun Rumus Perhitungan Indeks Keluarga Sehat sebagai berikut:

IKS Wilayah =	<u>Total Keluarga Sehat</u> Jumlah Seluruh Keluarga terdata di Wilayah Tersebut
IKS Kota Banda Aceh =	<u>47.607</u>
	59.012
=	0,81

Dari 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh menjadi Kab/Kota dengan perolehan capaian IKS tertinggi yaitu 0,81 dengan predikat **Sehat**.

Dari data diatas, indikator yang capaiannya masih rendah di Kota Banda Aceh adalah penderita TB paru yang berobat sesuai standar, penderita hipertensi yang berobat teratur, dan juga beberapa indikator lain yang belum mencapai 100% sehingga IKS Kota Banda Aceh belum mencapai 0,90 sesuai target yang telah ditetapkan.

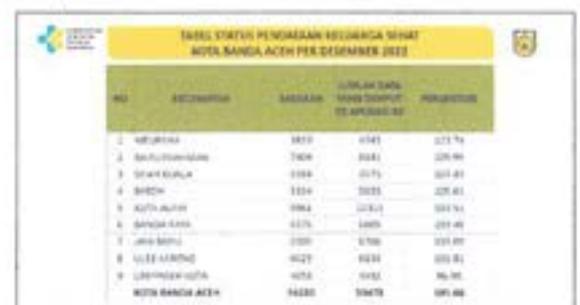
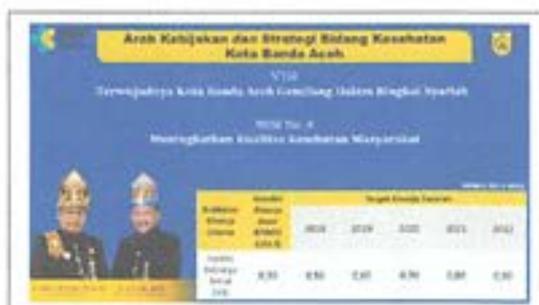
Rekapitulasi IKS Keluarga digunakan untuk menghitung/menetapkan IKS suatu wilayah (desa, kelurahan, kecamatan, dst) yang menunjukkan status kesehatan masyarakat wilayah tersebut.

Di Kota Banda Aceh telah dilakukan pendataan keluarga di 90 Gampong serta telah dientri di Aplikasi Keluarga Sehat, dan dapat dilihat pada dashbord status pendataan yang dapat menampilkan jumlah keluarga yang telah terdata dan Indeks Keluarga Sehat (IKS), dirinci dari nasional hingga desa dan kelurahan. Hasil pendataan keluarga sehat dari aplikasi keluarga sehat dapat diunduh sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut.

Kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)

	
<p>Pertemuan dengan Pengelola Program PIS-PK Dinas Kesehatan dan Puskesmas</p>	<p>Bimbingan Teknis Aplikasi Keluarga Sehat Dengan Pengelola Aplikasi Keluarga Sehat Puskesmas Kota Banda Aceh</p>
	
<p>Rapat Analisis Hasil PIS-PK Terintegrasi Lintas Program di Tingkat Kota Banda Aceh</p>	<p>Pertemuan Tindak Lanjut Analisis Data PIS-PK Kota Banda Aceh</p>

DATA PELAKSANAAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA (PIS- PK)



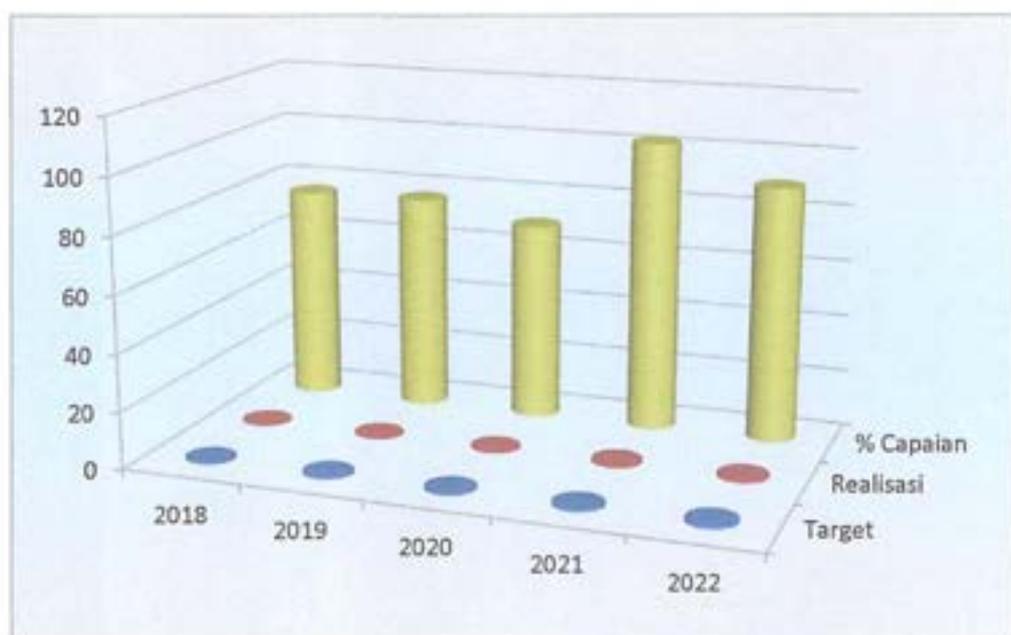


Target dan Realisasi Sasaran 4 terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2021 tersaji pada tabel 3.29 :

Tabel 3.29
Realisasi dan Target sasaran 4 terhadap target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	Indeks	2018	0,5	0,38	76,00
			2019	0,6	0,46	76,67
			2020	0,7	0,49	70,00
			2021	0,8	0,82	102,50
			2022	0,9	0,81	90,00

Grafik 3.8
Target dan Realisasi Sasaran 4 terhadap RPJMD



Berdasarkan Grafik diatas dapat dilihat bahwa Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Banda Aceh dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,33%. Jika dibandingkan dengan capaian IKS Provinsi Aceh sebesar 0,27 dan IKS Nasional sebesar 0,19 artinya IKS Kota Banda Aceh memperoleh capaian IKS tertinggi.

Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) merupakan program dengan menggunakan pendekatan keluarga untuk meningkatkan jangkauan sasaran dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor, Kota Banda Aceh berkomitmen untuk tetap aktif melaksanakan kegiatan ini dengan tetap memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan, guna memastikan pelaksanaan kegiatan PIS-PK tetap berjalan di masa pandemi Covid-19, petugas tetap melakukan kunjungan rumah, serta melakukan intervensi terhadap keluarga yang memiliki masalah kesehatan untuk mengetahui secara langsung kondisi kesehatan masyarakat pada masa pandemi, data PIS-PK juga dapat digunakan untuk melakukan tindakan dalam mencegah dan mengendalikan Covid -19 di wilayah Kota Banda Aceh.

Beberapa kendala dalam pencapaian terhadap target indeks keluarga Sehat (IKS) Kota Banda Aceh Tahun 2022 lebih rinci tertuang pada tabel 3.30:

Tabel 3.30
KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET INDEKS KELUARGA SEHAT (IKS)
DI KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL	% CAKUPAN KOTA BANDA ACEH	KENDALA	SOLUSI PEMECAHAN MASALAH
1	Penderita TB paru yang berobat sesuai standar	100%	69,30%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Pada saat pendataan masih ada stigma, pasien/penderita TB tidak mau mengakui sebagai penderita TB ➢ Pengobatan TB paru dengan obat program dirasakan terlalu berat oleh penderita karena rentang pengobatan terlalu lama dan efek dari obat dirasakan oleh pasien dapat menurunkan daya tahan tubuh 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan intervensi lanjutan oleh pengelola program puskesmas & Tim PIS-PK ➢ Melakukan sosialisasi kepada keluarga dan penyuluhan tentang penyakit TB Paru dan bahaya pengobatan TB Paru yang tidak sesuai standar
2	Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan	100%	81,70%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Keluarga merasa kesulitan untuk membuat pasien 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan intervensi lanjutan oleh pengelola

	tidak ditelantarkan			mau minum obat	program puskesmas & Tim PIS-PK <ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan pendekatan kepada keluarga dan stakeholder gampong ➢ Memberikan pemahaman kepada keluarga bagaimana cara merawat penderita gangguan jiwa
3	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	70%	80,79%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Masih kurangnya kesadaran dari keluarga/masyarakat tentang bahaya rokok dan apa saja yang terkandung didalam rokok ➢ Kebijakan Qanun KTR belum sepenuhnya diterapkan di tingkat gampong 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan intervensi lanjutan oleh pengelola program puskesmas & Tim PIS-PK ➢ Penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar peraturan sesuai dengan Qanun KTR No. 5 Tahun 2016
4	Penderita hipertensi yang berobat teratur	100%	70,76%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Penderita hipertensi menganggap bahwa penyakitnya tidak membutuhkan pengobatan medis, bisa diobati sendiri secara tradisional sehingga tidak perlu berobat di pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan intervensi lanjutan oleh pengelola program puskesmas & Tim PIS-PK ➢ Memberikan pemahaman kepada pasien dan keluarga akibat yang terjadi bila tidak berobat teratur.
5	Keluarga mengikuti program KB *)	65,00%	83,53%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Cakupan keluarga mengikuti program KB di Kota Banda Aceh sudah cukup bagus, dikarenakan sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh nasional 	
6	Persalinan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	99,44%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Saat ini capaian persalinan adalah 100%, tetapi ada data lama yang belum diupdate 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Menunggu update aplikasi dari Pusdatin Kemenkes
7	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *)	100%	96,46%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Masih ada beberapa orang tua yang tidak mau memberikan imunisasi kepada anaknya 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan penyuluhan kepada orang tua
8	Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	100%	96,22%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Masih ada orang tua yang tidak memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan secara teratur 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan penyuluhan kepada orang tua
9	Pertumbuhan Balita	100%	95,99%	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Masih ada orang tua yang 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Melakukan penyuluhan

	dipantau			tidak membawa balitanya ke posyandu	kepada orang tua
10	Keluarga sudah menjadi anggota JKN	100%	99.60%	➢ Anggota yang belum menjadi anggota JKN merupakan warga/mahasiswa pendatang ke Kota Banda Aceh	➢ Memberikan edukasi kepada masyarakat pentingnya menjadi anggota JKN
11	Keluarga memiliki akses/ menggunakan sarana air bersih	100%	99.76%	➢ Capaian akses sarana air bersih Kota Banda Aceh sudah 100 %, tetapi data di aplikasi belum diupdate	➢ Menunggu update data dari kemenkes
12	Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	100%	99.76%	➢ Capaian menggunakan jamban Kota Banda Aceh sudah 100 %, tetapi data di aplikasi belum diupdate	➢ Menunggu update data dari kemenkes

3.3.5 Sasaran Strategis 5 : "Terwujudnya Kota Banda Aceh Sebagai Kota Ramah Birokrasi"

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis "Terwujudnya Kota Banda Aceh Sebagai Kota Ramah Birokrasi" dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dikategorikan **Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar **99,07**. Keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- ◆ Indikator Kinerja "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" yang ditargetkan sebesar 90 dapat direalisasikan sebesar 89,16 dengan persentase tingkat capaian sebesar 99,07% atau mendapat kategori Baik sebagaimana disajikan dalam tabel 3.31:

Tabel 3.31
Realisasi Indikator Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		(% Capaian	Kategori
			Target	Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	90	89,16	99,07	Baik
Rata-rata Capaian Kinerja					99,07	

Untuk mengukur sasaran kelima digunakan satu indikator Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kota Banda Aceh Tahun 2022 terealisasi sebesar 99,07% (Kategori sangat Baik) dari target 90%. Capaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2022 sedikit menurun dibandingkan capaian Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2021 sebesar 103,49% dengan selisih sebesar 4,42%.

Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan terhadap masyarakat yang menggunakan layanan pada Unit Pelayanan Publik (UPP), dengan menggunakan kuisisioner secara datang langsung ke UPP maupun online. Jumlah sampel responden sesuai Skala Likert sebanyak **8.804** responden. Berdasarkan hasil penghitungan survei kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat per unsur pelayanan dan peringkatannya tersaji pada Tabel 3.32:

Tabel 3. 32
Nilai SKM Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Nama UPP	Nilai SKM	Kategori	Jumlah Responden	Metode SKM
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	96,57	A (Sangat Baik)	10	Manual
2	Disdukcapil	97,26	A (Sangat Baik)	384	Manual & Online
3	RSUD Meuraxa	90,46	A (Sangat Baik)	800	Manual
4	DPMPPTSP	93,65	A (Sangat Baik)	384	Manual & Online
5	DLHK3	89,46	A (Sangat Baik)	160	Manual

6	Badan Pengelolaan Keuangan Kota	83,43	B (Baik)	60	Manual
7	Dinas Tenaga Kerja	85,90	B (Baik)	40	Manual
8	Dinas Kesehatan	80,32	B (Baik)	132	Manual
9	Kecamatan Banda Raya	95,05	A (Sangat Baik)	175	Online
10	Kecamatan Baiturrahman	96,10	A (Sangat baik)	175	Manual
11	Kecamatan Syiah Kuala	97,30	A (Sangat Baik)	409	Online
12	Kecamatan Kuta Alam	92,41	A (Sangat Baik)	175	Manual
13	Kecamatan Lueng Bata	92,39	A (Sangat Baik)	130	Manual
14	Kecamatan Kuta Raja	92,44	A (Sangat Baik)	175	Manual
15	Kecamatan Jaya Baru	97,54	A (Sangat Baik)	240	Manual
16	Kecamatan Ulee Kareng	83,37	B (Baik)	273	Manual
17	Kecamatan Meuraxa	98,60	A (Sangat Baik)	175	Manual
18	UPTD Puskesmas Kop. Darussalam	89,01	A (Sangat Baik)	384	Manual
19	UPTD Puskesmas Baiturrahman	97,90	A (Sangat Baik)	400	Manual
20	UPTD Puskesmas Batoh	88,24	B (Baik)	310	Manual

21	UPTD Puskesmas Lampaseh	85,31	B (Baik)	396	Manual
22	UPTD Puskesmas Meuraxa	86,48	B (Baik)	754	Manual
23	UPTD Puskesmas Lampulo	86,90	B (Baik)	365	Manual
24	UPTD Puskesmas Kuta Alam	86,40	B (Baik)	375	Manual
25	UPTD Puskesmas Jeulingke	85,03	B (Baik)	384	Manual
26	UPTD Puskesmas Banda Raya	85,18	B (Baik)	620	Manual
27	UPTD Puskesmas Ulee Kareng	83,22	B (Baik)	400	Manual
28	UPTD Puskesmas Jaya Baru	83,29	B (Baik)	384	Manual
29	UPTD Terminal	81,02	B (Baik)	60	Manual
30	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	80,60	B (Baik)	60	Manual

Sumber : Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. 2023

Dalam penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Unsur pelayanan kota banda Aceh tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Nilai IKM Kota Banda Aceh Tahun 2021-2022

No	Unsur Pelayanan	Nilai Tahun 2022 Semester 1	Nilai Tahun 2022 Semester II	Kinerja Pelayanan
1	Persyaratan	3,46	3,53	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,51	3,54	Sangat Baik

3	Waktu Penyelesaian	3,44	3,47	Baik
4	Biaya/Tarif	3,82	3,86	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,54	3,54	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,52	3,53	Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,56	3,58	Sangat Baik
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,63	3,58	Sangat Baik
9	Sarana dan Prasarana	3,70	3,69	Sangat Baik
Nilai SKM		88,58	89,74	
Mutu Pelayanan		A	A	
Kinerja Unit Pelayanan		Sangat Baik	Sangat Baik	
IKM		89,16 (Sangat Baik)		

Nilai IKM Kota Banda Aceh Tahun 2022 sebesar **89,16** naik sebesar 1,19 poin dari IKM Tahun 2021 yang memiliki nilai sebesar 87,97, begitu juga dengan mutu pelayanan dari B menjadi **A** dengan kinerja unit pelayanan "**Sangat Baik**". Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil analisis survei kepuasan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai berikut :

Faktor Pendorong

- a. Komitmen pimpinan hingga petugas pelayanan yang konsisten memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat yang dapat dilihat pada beberapa unsur dalam SKM seperti Unsur pelayanan yang memiliki kualitas paling baik adalah Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Layanan, Perilaku Pelaksana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan dan Sarana dan Prasarana Sedangkan unsur pelayanan yang memiliki kualitas baik adalah Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian, Kompetensi Pelaksana hal tersebut berlaku untuk 30 Instansi/Unit layanan publik.
- b. Pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun ketahun melakukan pembenahan baik secara internal maupun eksternal. Pembenahan secara internal dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan tujuan untuk mengoptimalkan kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan. Secara eksternal dengan melakukan koordinasi lintas

sektoral sesuai dengan kewenangan dan ruang lingkup permasalahan terkait dengan jenis pelayanan yang diberikan.

- c. Disamping pembenahan internal untuk mengoptimalkan kinerja pegawai, juga perlu dilaksanakan peningkatan sarana dan prasarana untuk menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Disamping faktor pendorong yang sudah dijelaskan berkaitan dengan pencapaian target Indeks Kepuasan Masyarakat, masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi program kegiatan. Berikut faktor penghambat yang sudah diidentifikasi beserta strategi apa yang dapat dilaksanakan untuk mengurangi dampak.

Faktor penghambat :

1. Keterbatasan dan kekurangan anggaran untuk pemenuhan maupun perbaikan sarana dan prasarana ditempat pelayanan yang dinikmati dan digunakan oleh masyarakat maupun sarana prasarana serta teknologi yang dapat menunjang kinerja petugas pelayanan agar lebih maksimal; dan
2. Masyarakat yang pasif saat datang ketempat pelayanan, tidak mau membaca informasi yang sudah tertera maupun kurang aktif dalam bertanya dan menyampaikan keinginannya kepada petugas pelayanan.

Strategi Pemecahan Masalah :

Berdasarkan uraian diatas, maka beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Masyarakat dapat melihat dan mengakses prosedur dan persyaratan dalam mendapatkan pelayanan pada website www.sipppn.menpan.go.id
- b. Pengguna layanan dapat memberikan *contact person* pengguna kepada pemberi layanan sehingga dapat tersampaikan estimasi penyelesaian layanan. Apabila layanan belum terselesaikan maka diharapkan kepada pemberi layanan memberi informasi kepada pengguna layanan melalui *contact person* dan alasan belum terselesaikan.

Perbandingan nilai IKM Pemerintah Kota Banda Aceh dengan Kementerian dan daerah lain :

Tabel 3.34

Perbandingan IKM Kota Banda Aceh dengan daerah lain

Instansi	Nilai IKM 2022
Kementerian Kelautan dan Perikanan	89,32
Pemerintah Kota Banda Aceh	89,16
Pemerintah Kota Tarakan	85,71
Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur	84,44



Kondisi Ruang Pelayanan pada Disdukcapil dan DPMPPTSP



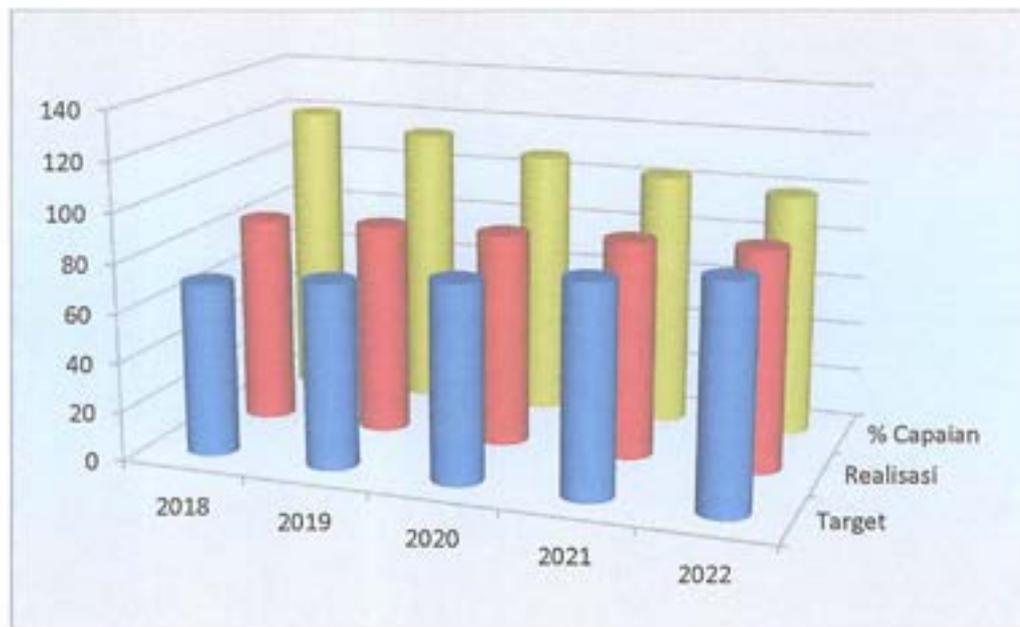
Beberapa informasi terkait pelayanan yang disampaikan melalui media social, website, banner/baliho serta diruang pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat

Realisasi dan Target indikator kinerja IKM Sasaran 5 terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.35:

Tabel 3.35
Realisasi dan Target Indikator Kinerja IKM sasaran 5 terhadap target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	2018	70	84,18	120,26
			2019	75	85,61	114,15
			2020	80	86,49	108,11
			2021	85	87,97	103,49
			2022	90	89,16	99,07

Grafik 3.9
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap target RPJMD



3.3.6 Sasaran Strategis 6 : "Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pencapaian Kota Layak Huni"

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis "Peningkatan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Pencapaian Kota Layak Huni" dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni dikategorikan Sangat Baik

dengan rata-rata persentase capaian sebesar 112. Keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

- ◆ Indikator Kinerja “Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni” yang ditargetkan sebesar 63,40 dapat direalisasikan sebesar 71,6 dengan persentase tingkat capaian sebesar 112% atau mendapat kategori Sangat Baik sebagaimana disajikan dalam tabel 3.36:

Tabel 3.36
Realisasi Indikator Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		(% Capaian)	Kategori
			Target	Realisasi		
1.	Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	Indeks	63,40	71,60	112	Sangat Baik
Rata-rata Capaian Kinerja					112	

Indikator Kinerja Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni dilaksanakan melalui perangkat daerah Bappeda dimana Berdasarkan surat Kepala Bappeda pemerintah Kota Banda Aceh Nomor 065/161/2023 Tanggal 13 Februari 2023 Hal Capaian Kinerja IKU “Indeks Kota Layak Huni” Tahun 2022 bahwa nilai Indeks Kota layak Huni tersebut diperoleh dari hasil penelitian/survey yang dilaksanakan oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) pada beberapa kota terpilih di seluruh Indonesia termasuk Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dari hasil Konfirmasi dengan pengurus IAP, bahwa untuk Tahun 2022 pihak IAP telah melakukan survey *Most Livable City Indeks (MLCI)* atau Indeks Kota Layak Huni Kota Banda Aceh pada Bulan November-Desember 2022 di beberapa kota seluruh Indonesia namun hingga saat ini pihak IAP belum mengeluarkan hasil survey tersebut, sehingga data laporan capaian indikator kinerja Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni tahun 2022 masih menggunakan data Tahun 2021.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jalan Nyak Adam Hamid No. 19A Neusu Jaya, Telpun. (0651)32399 Fax. (0651)31512
 Email: bappeda@bandacehkota.go.id Website: http://bappeda.bandacehkota.go.id
BANDA ACEH - 23243

Banda Aceh, 15 Februari 2023 M
 15 Jumadil Awal 1444 H

Nomor : 164/P.1/2023
 Sifat : Segana
 Lampiran : -
 Hal : Capaian Kinerja IKU
 Periode Tahun 2022

Kepada
 Yth. Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
 Cq. Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah
 Kota Banda Aceh

di -
 BANDA ACEH

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Nomor 065.0004 tanggal 3 Januari 2023 tentang hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa untuk capaian IKU Indeks Kota Layak Huni tahun 2022 belum tersedia data.

Dapat kami jelaskan bahwa nilai Indeks Kota Layak Huni tersebut diperoleh dari hasil penelitian/survei yang dilaksanakan oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) pada beberapa kota terpilih di seluruh Indonesia. Dari hasil konferensi kami dengan pengurus IAP, bahwa untuk tahun 2022 pihak IAP telah melakukan survey *Most Livable City Index (MLCI)* atau Indeks Kota Layak Huni pada bulan November-Desember 2022 di beberapa kota seluruh Indonesia termasuk Kota Banda Aceh. Namun demikian hingga saat ini pihak IAP belum mengeluarkan hasil survey tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

A
 KEPALA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

 Weri, S.E.MA
 Pembina Tingkat I
 Nip. 19640525 198903 1 026

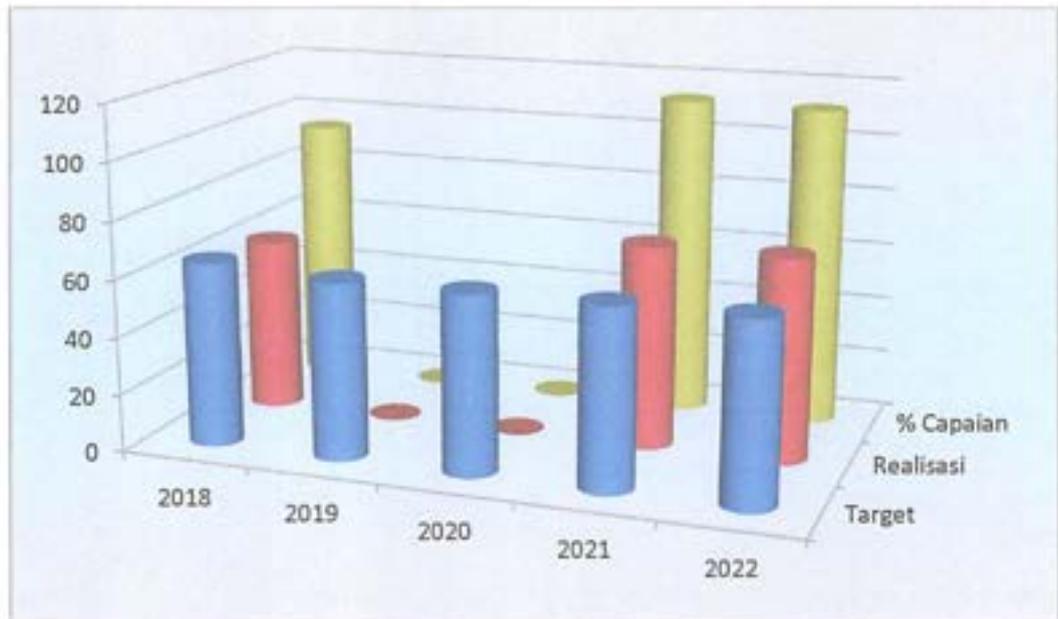
Realisasi dan Target Sasaran 6 terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.37:

Tabel 3.37
Realisasi dan Target Sasaran 6 terhadap target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	Indeks	2018	64.4	60.9	94.57
			2019	61.9	0	-
			2020	62.4	0	-
			2021	62.9	71	112.88
			2022	63.4	71	112

Grafik 3.10

Target dan Realisasi sasaran 6 terhadap target RPJMD Tahun 2022



3.2.7 Sasaran Strategis 7 : "Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak"
 Indikator Kinerja, target, realisasi, capaian dan kategori dari sasaran strategis 7 disajikan dalam tabel 3.38 berikut ini:

Tabel 3.38

Realisasi Indikator Sasaran 7 Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		(% Capaian	Kategori
			Target	Realisasi		
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	97,1	95,54	98,39	Sangat Baik
2.	Persentase Indikator Kota layak anak yang dipenuhi	%	65	78,8	121,23	
Rata-rata Capaian Kinerja					109,81	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran strategis "Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak" dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator kinerja ini dikategorikan **Sangat Baik** dengan rata-rata persentase capaian sebesar

109,81. Keberhasilan dan kegagalan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mencapai sasaran strategis ini didukung oleh capaian indikator kinerja dengan analisis sebagai berikut:

3.2.7.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

- ◆ Indikator Kinerja “Indeks Pembangunan Gender (IPG)” yang ditargetkan sebesar 97,1 dapat direalisasikan sebesar 95,54 dengan persentase tingkat capaian sebesar 98,39% atau mendapat kategori Baik.

Tabel 3.39

Realisasi Indikator Kinerja Angka Kemiskinan sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		(% Capaian	Kategori
			Target	Realisasi		
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	97,1	95,54	98,39	Baik

Analisis capaian Indikator Indeks pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar:

1. Kesehatan (umur panjang dan hidup sehat)
2. Pendidikan (pengetahuan)
3. Ekonomi (standar hidup layak)

Nilai IPG Kota Banda Aceh tahun 2022, sampai dengan laporan ini dibuat belum diperoleh. Nilai IPG yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik tahun 2022 adalah nilai IPG tahun 2021 sebesar 95.54%, tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 97.1%.

Penetapan target yang lebih tinggi dari estimasi kenaikan nilai IPG per tahunnya menyebabkan capaian tidak sesuai dengan target yang direncanakan. Namun demikian, nilai IPG tetap mengalami kenaikan setiap tahunnya dan berada diatas nilai IPM.

Data perbandingan IPM dengan IPG tahun 2017-2021, disajikan pada grafik 3.11:

Grafik 3.11
IPM dan IPG Kota Banda Aceh
Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa IPG Kota Banda Aceh dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan per tahun dan berada diatas nilai IPM.

Nilai IPG diatas nilai IPM menunjukkan bahwa tidak terjadi ketimpangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yang mengarah kepada terwujudnya kesetaraan gender di Kota Banda Aceh.

Analisis terhadap pelaksanaan Indikator Indeks Pembangunan gender terhadap Capaian yaitu:

- Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan;
- Prioritas PUG dalam pembangunan masuk dalam dokumen RPD Tahun 2023-2026; dan
- Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- Rekomendasi terhadap pelaksanaan Indikator Indeks Pembangunan gender yaitu:
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Banda Aceh.

Permasalahan terhadap pelaksanaan Indikator Indeks Pembangunan gender yaitu:

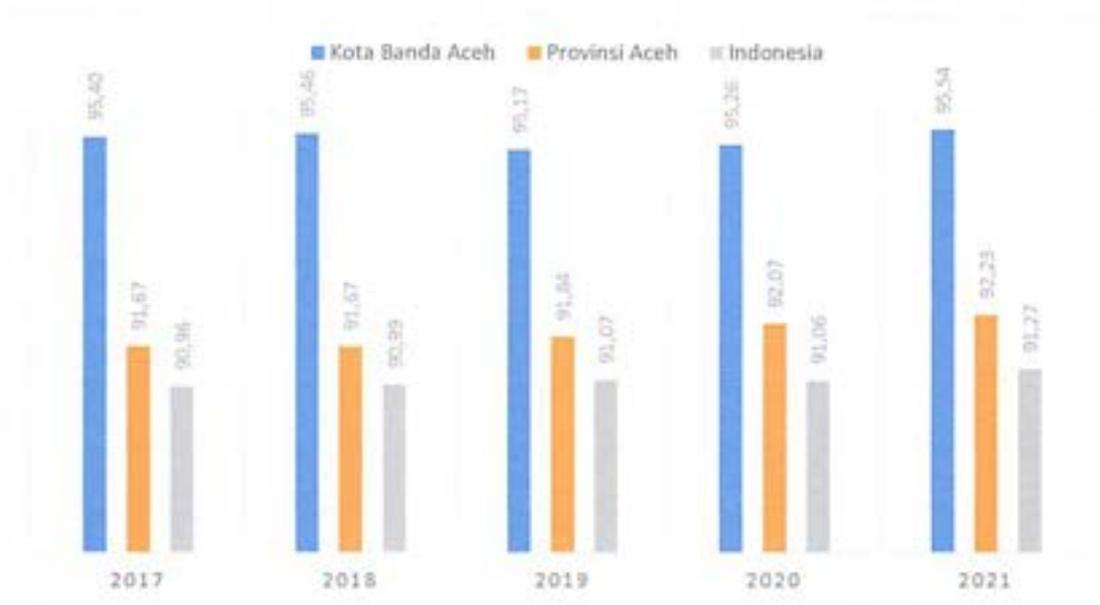
- Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang belum optimal, dan terbatasnya anggaran program untuk mendukung pengarusutamaan gender dan perencanaan penganggaran yang responsif gender;
- Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah 13.3 %;
- Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan; dan
- Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.

Strategi terhadap pelaksanaan Indikator Indeks Pembangunan gender yaitu:

- Mengoptimalkan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender serta adanya anggaran program untuk mendukung pengaru
- sutamaan gender dan perencanaan penganggaran yang responsif gender;
- Peningkatan partisipasi perempuan di bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi;
- Pelatihan manajemen usaha bagi perempuan; dan
- Advokasi dan sosialisasi para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang.

Di tingkat provinsi dan nasional, nilai IPG Kota Banda Aceh juga sangat baik berada di atas nilai IPG Propinsi Aceh dan Indonesia, disajikan pada grafik 3.12:

Grafik 3.12
IPG Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Indonesia
Tahun 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan grafik 2, secara umum dapat dilihat bahwa nilai IPG Kota Banda Aceh tahun 2017-2021 berada di atas nilai provinsi dan Indonesia (nasional).

Kota Banda Aceh telah menunjukkan pencapaian yang semakin baik ke arah keberhasilan pembangunan. Hal ini sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan antara partisipasi perempuan dan laki-laki yang terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

3.2.7.2 Persentase indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi

- ◆ Indikator Kinerja "Persentase indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi" yang ditargetkan sebesar 65 dapat direalisasikan sebesar 78,8 dengan persentase tingkat capaian sebesar 121,23% atau mendapat kategori Sangat Baik.

Tabel 3.40

Realisasi Indikator Kinerja Angka Kemiskinan sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		(% Capaian	Kategori
			Target	Realisasi		
	Persentase Indikator Kota layak anak yang dipenuhi	%	65	78,8	121,23	Sangat Baik

Analisis Capaian Kinerja Kota Layak Anak (KLA) adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Sebagai bentuk implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak, Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat komitmen untuk melaksanakan pembangunan berbasis hak anak sebagai upaya percepatan pengembangan Kota Banda Aceh menuju Kota Layak Anak. Upaya percepatan dimaksud dilakukan melalui strategi kolaborasi dengan melibatkan stake holder terkait dalam lingkungan pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha dan media.

Indikator KLA terbagi dalam 1 (satu) klaster **Penguatan Kelembagaan** dan 5 (lima) klaster **Pemenuhan Hak Anak**.

Klaster : Penguatan Kelembagaan

1. Tersedia Peraturan/Kebijakan Daerah tentang Kabupaten/Kota LAYak Anak;
2. Menguatnya kelembagaan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA); dan
3. Keterlibatan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak.

Klaster I : Hak Sipil Dan Kebebasan

1. Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran;
2. Tersedia fasilitasi Informasi Layak Anak (ILA); dan
3. Terlembaganya Partisipasi Anak.

Klaster II : Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

1. Persentase Perkawinan Anak;

2. Tersedia lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua/keluarga;
3. Persentase lembaga pengasuhan alternative terstandarisasi;
4. Persentase pengembangan anak usia dini holistic dan integrative (PAUD-HI); dan
5. Tersedia infrastruktur (sarana dan prasarana) di ruang publik yang ramah anak.

Klaster III : Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

1. Persentase persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. Prevelensi status gizi balita;
3. Persentase Cakupan Pemberian Makan pada bayi dan anak (PMBA) Usia di bawah 2 tahun;
4. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak;
5. Persentase Rumah Tangga dalam akses air minum dan sanitasi yang layak; dan
6. Tersedia kawasan tanpa rokok dan tidak ada iklan, promosi dan sponsor rokok.

Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, & Kegiatan Budaya

1. Persentase wajib belajar 12 tahun;
2. Persentase sekolah ramah anak (SRA); dan
3. Tersedia fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang Ramah Anak.

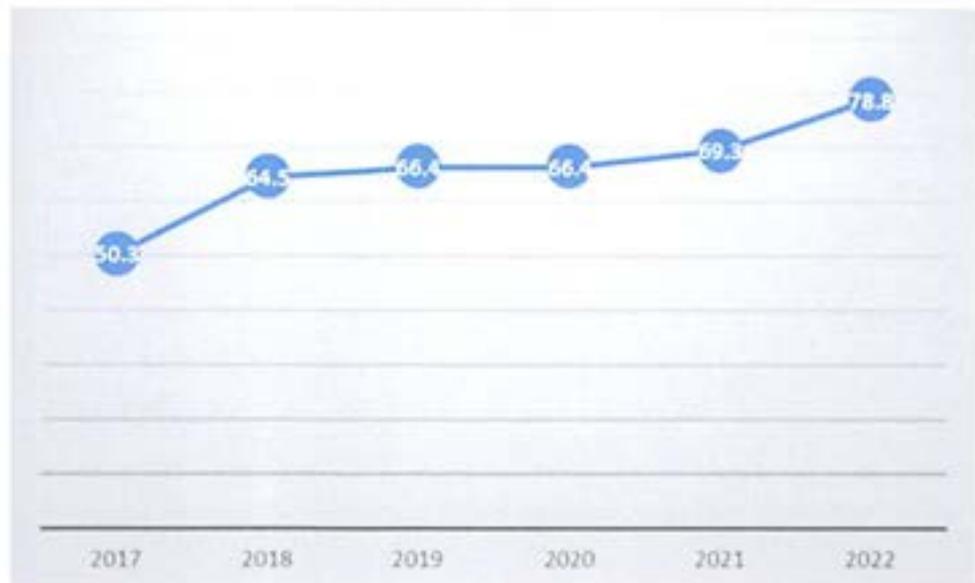
Klaster V : Perlindungan Khusus

1. Peraturan daerah/kebijakan, upaya Pencegahan, penyediaan layanan, penguatan dan pengembangan lembaga;
2. Situasi darurat dan pornografi (anak korban bencana dan konflik yang terlayani; HIV-AIDS dan NAPZA);
3. A. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) (khusus pelaku) yang terselesaikan; anak korban jaringan terorisme; anak korban stigmatisasi akibat dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya yang terlayani;
B. Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang terlayani; anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
4. Perlindungan anak dari KTA (kekerasan, penelantaran, eksploitasi ekonomi (BPTA) dan seksual, perdagangan serta kejahatan seksual).

Berdasarkan hasil evaluasi KLA tahun 2022 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kota Banda Aceh memperoleh nilai/skor 788 (78,8%) dalam

Kategori Nindya. Skor KLA Kota Banda Aceh tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 65%. Nilai evaluasi KLA Kota Banda Aceh tahun 2017-2022 tersaji pada Grafik 3.13:

Grafik 3.13
Skor Kota Layak Anak Kota Banda Aceh
Tahun 2017-2022



Sumber : DP3AP2KB, 2022

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa skor KLA Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 mengalami peningkatan. Tahun 2018, Kota Banda Aceh mendapatkan penghargaan KLA dalam kategori Pratama dengan skor 645 berdasarkan evaluasi KLA tahun 2017 dan 2018. Tahun 2019, Kota Banda Aceh memperoleh penghargaan yang lebih tinggi dalam kategori Madya dengan skor 664. Di tahun 2020, tidak dilakukan evaluasi KLA akibat pandemi Covid-19. Tahun 2021, Kota Banda Aceh kembali memperoleh penghargaan KLA dalam kategori Madya dengan skor 693 untuk evaluasi tahun 2020 dan 2021. Dan di Tahun 2022 Kota Banda Aceh kembali berhasil mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dengan peningkatan kategori menjadi **Nindya** dengan skor 788. Nilai ini berdasarkan hasil evaluasi KLA tahun 2021 – 2022 yang telah diverifikasi dan diperbaiki kembali.

Analisis Capaian pelaksanaan kegiatan Kota Layak Anak Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Isu Perlindungan Anak termuat dalam RPJM Kota Banda Aceh sehingga menjadi peluang isu ini diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan yang tersebar di berbagai SKPD terkait untuk pengembangan kota layak anak
- b. Terbentuknya Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Banda Aceh yang mencakup lima klaster hak anak terdiri dari berbagai unsur yakni pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media
- c. Dukungan masyarakat, media usaha dan media termasuk kelompok anak
- d. Keberadaan Kota Banda Aceh sebagai ibukota memberikan banyak peluang dari pihak di luar Pemerintah Kota Banda Aceh

Rekomendasi terhadap pelaksanaan indikator Kota Layak anak Tahun 2022 yaitu:

- a. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak
- b. Peraturan Walikota Nomor 98 Tahun 2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak
- c. Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 36/DP3AP2KB/Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Kota Layak Anak
- d. Dokumentasi Pengembangan Kota Layak Anak Kota Banda Aceh

Faktor penghambat terhadap ketidakcapaian terhadap pelaksanaan indikator Kota Layak anak Tahun 2022 yaitu:

- a. Belum semua SKPD mempunyai regulasi khusus untuk isu perlindungan anak. Seperti BPBD dan Diskominfo, regulasi yang disusun bersifat umum untuk semua kelompok masyarakat, sementara ada hal tertentu yang mengharuskan adanya regulasi dan kebijakan khusus terkait dengan usia anak; dan
- b. Keterbatasan anggaran untuk merealisasikan rencana program dan kegiatan yang mendukung pemenuhan indikator pengembangan kota layak anak

Strategi pemecahan terhadap faktor penghambat yaitu:

Membangun kemitraan dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk berbagai program yang menasar berbagai kelompok masyarakat pemenuhan hak anak dan partisipasi anak.

Beberapa kemitraan yang telah dilakukan selama tahun 2022 diantaranya:

- a. Dukungan Pegadaian untuk Forum Anak Kota Banda Aceh pada Program Saweu Sikula
- b. Pengembangan partisipasi anak dan remaja oleh Yayasan Aceh Hijau di 10 gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh

- c. Pendampingan Lembaga PKPM untuk membangun mekanisme perlindungan Anak di gampong pada dua gampong pilot project
- d. Live talk show isu perlindungan anak bersama RRI Banda Aceh untuk memperluas jangkauan informasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan sharing praktik baik yang dilakukan oleh pemerintahan gampong
- e. Kerjasama dengan Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah untuk penyediaan tenaga psikolog/konselor pada unit layanan Pusat Pembelajaran Keluarga dengan layanan utama konseling dan psikoedukasi.
- f. Kerjasama dengan Fakultas PG PAUD Universitas Bina Bangsa Get Sampena pada Program Praktisi Mengajar Mata Kuliah Perlindungan Anak
- g. Kerjasama dengan Mahkamah Syar'iyah untuk konseling anak dan perempuan berhadapan dengan hukum

Rangkaian kegiatan Kota Layak Anak Tahun 2022:

- Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak



- Rapat Koordinasi Persiapan Evaluasi Kota Layak Anak



- Penandatanganan MOU DP3AP2KB dengan BNN Kota Banda Aceh



- Koordinasi DP3AP2KB dan PUSPAGA dengan SMP N 16 Kota Banda Aceh tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di Sekolah



- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kelas Ayah Dalam Rangka Pemenuhan Hak Kesehatan Anak (IMUNISASI) bersama UNICEF Kota Banda Aceh, YADUA, YOUTH ID, Forum Anak, SKPD Terkait dan Kepala Desa/Gampong



- Pertemuan dengan BAPPENAS RI dalam Rangka Pengembangan Kota Layak Anak Kota Banda Aceh bersama SKPD terkait, UNICEF Kota Banda Aceh, PKPM Kota Banda Aceh dan Forum Anak Kota Banda Aceh



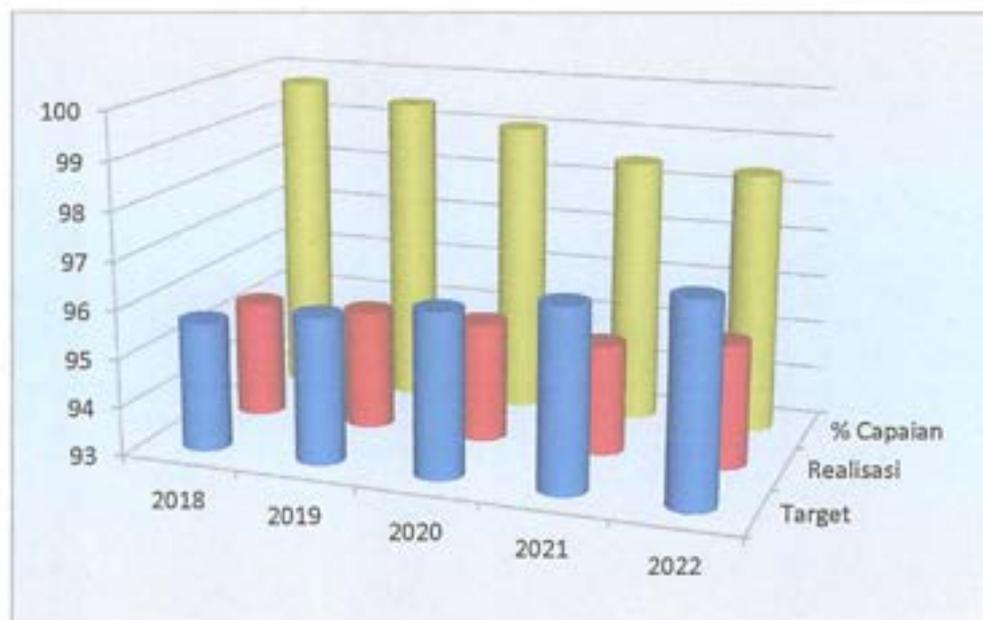
Realisasi dan Target Sasaran 7 terhadap target kinerja RPJMD pada tahun 2022 tersaji pada Tabel 3.39:

Tabel 3.41
Target dan Realisasi sasaran 7 terhadap target RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT	TAHUN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1	Indek Pembangunan Gender (IPG)	%	2018	95,66	95,4	99,73
			2019	96,02	95,46	99,42
			2020	96,38	95,46	99,05
			2021	96,74	95,26	98,47
			2022	97,1	95,54	98,39
2	Persentase Indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi	%	2018	53	64	120,75
			2019	56	76,4	136,43
			2020	59	76,4	129,49
			2021	62	69,3	111,77
			2022	65	78,8	121,23

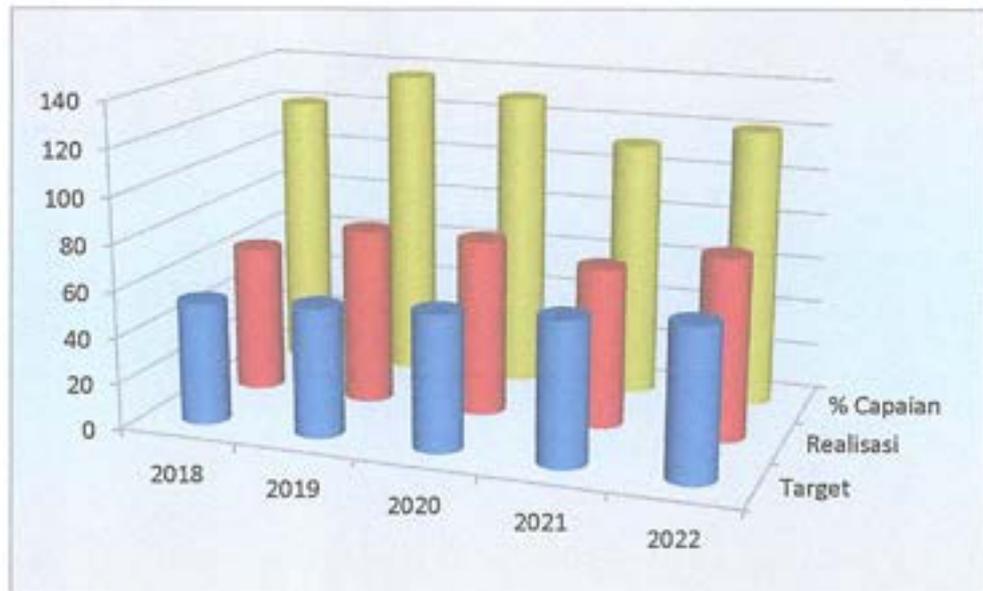
Grafik 3.14

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Gender (IPG) sasaran 7 terhadap target RPJMD



Grafik 3.15

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Persentase Indikator Kota Layak Anak yang dipenuhi sasaran 7 terhadap target RPJMD



3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 1,410,626,5047,131,- dengan capaian sebesar 94,60 % dari total Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1,334,504,795,398,-

Realisasi Anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2022 berdasarkan program yang diperuntukkan dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja .

Hasil analisis capaian kinerja sasaran, program dan indikator kinerja dan persentase penyerapan anggaran tersaji pada Tabel 3.42:

Tabel 3.42
Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Program	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian %	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian %
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Indek Kota Syariah Kota Banda Aceh	1. Program Syariat Islam Aceh 2. Program majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 3. Program majelis Adat Aceh 4. Program pendidikan Dayah	85%	79,85	93,94	23,633,479,273	15,302,878,178	64.75
Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	1. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan 3. Program Pengembangan Kebudayaan 4. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 5. Program Pengelolaan Permuseuman 6. Program Pengelolaan Pendidikan 7. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 8. Program Pembinaan Perpustakaan 9. Program Pengelolaan Anasir	80%	83,21	104,01	94,159,585,917	82,130,430,343	87.22
Peningkatan kesejahteraan masyarakat	Angka Kemiskinan	1. Program Pengembangan UMKM 2. Program Pengawasan dan	18,263 jwa	19,900 jwa	91,77	29,367,440,656	21,779,252,277	74.16

	<p>Pemeriksaan Koperasi</p> <p>3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</p> <p>4. Program Baitul Mal</p> <p>5. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</p> <p>6. Program Pengawasan Keamanan Pangan</p> <p>7. Program Hubungan Industrial</p> <p>8. Program Rehabilitasi Sosial</p> <p>9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</p> <p>10. Program Pemberdayaan Sosial</p> <p>11. Program Penanganan Bencana</p>							
Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</p> <p>2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</p> <p>3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</p> <p>4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri</p> <p>5. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>6. Program Penempatan Tenaga Kerja</p> <p>7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</p>	5,68%	8,62	65,89	53,553,787,695	41,902,868,519	78,24	

		<p>10 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</p> <p>11 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>12. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</p> <p>13. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</p> <p>14. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</p>						
	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	<p>1. Program Promosi Penanaman Modal</p> <p>2. Program Pelayanan Penanaman Modal</p> <p>3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</p> <p>4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</p>	100%	59,36	59,36	1,044,584,693	607,489,000	58.16
Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	<p>1. Program Perneruhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>2. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman</p> <p>3. Program Pemberdayaan Masyarakat</p>	0,9%	0,81	90%	48,569,677,561	40,021,861,989	82.40

		Bidang Kesehatan						
Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 4. Program Kepegawaian Daerah 5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 6. Program Pendaftaran Penduduk 7. Program Pencatatan Sipil 8. Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan 9. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 10. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 11. Program Perekonomian dan Pembangunan 12. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 13. Program Penyelenggaraan Pengawasan 14. Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	90%	89,16	99,07	49,028,511,909	34,165,438,151	69,68

		15. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa 16. Program Penataan Desa 17. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 18. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 19. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Peranganan Konflik Sosial						
Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	1. Program pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PLH) 2. Program Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati) 3. Program penanganan pengaduan Lingkungan Hidup 4. Program Pengelolaan persampahan 5. Program Pengelolaan Sumber daya Air (SDA) 6. Program	63,40%	71,00	112	126,837,974,870	101,015,686,642	79.64

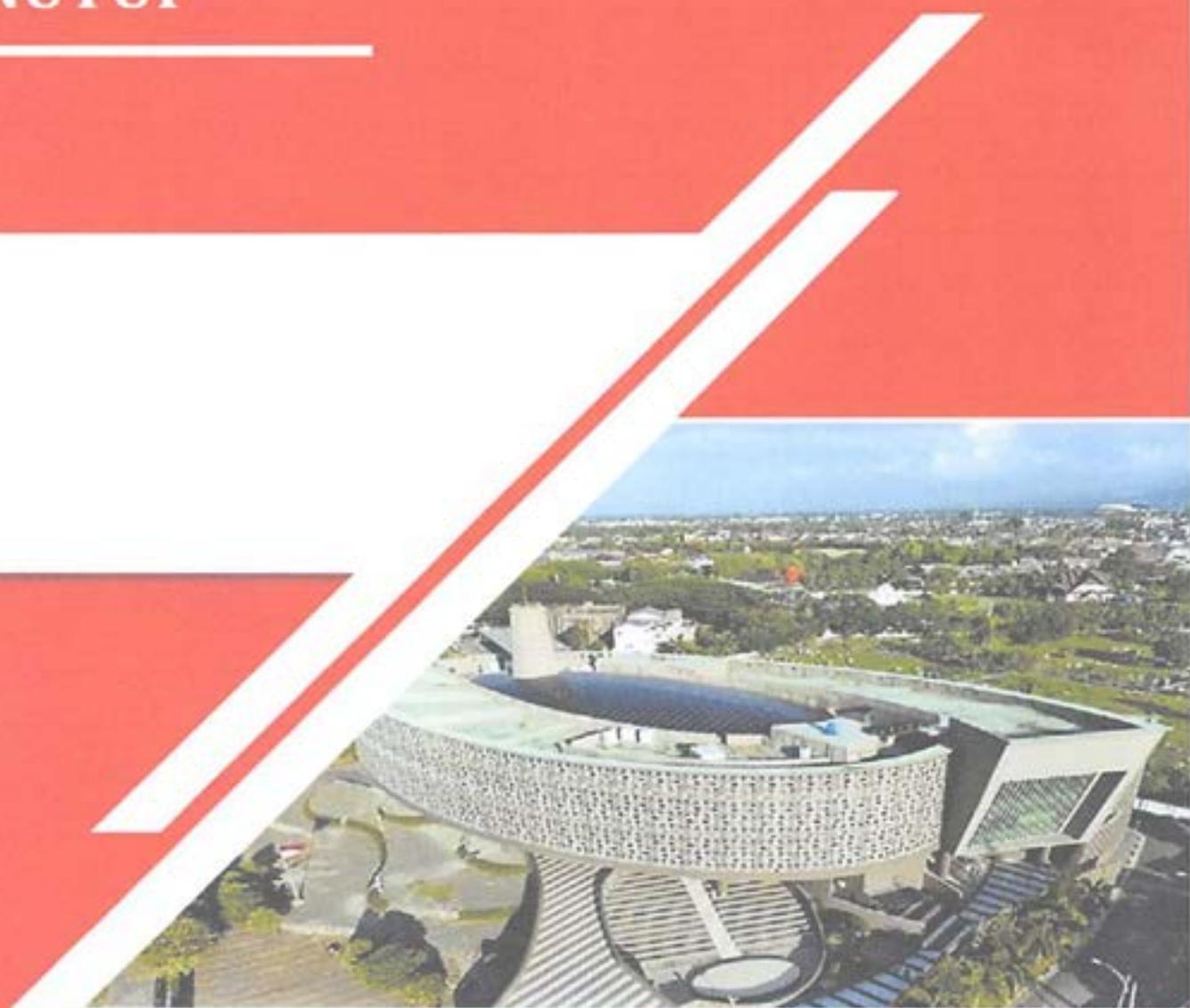
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 7. Program Pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 8. Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air limbah 9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 10. Program Penataan bangunan gedung 11. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya 12. Program Penyelenggaraan jalan 13. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 14. Program pengembangan Perumahan 15. Program kawasan Permukiman 16. Program perumahan dan kawasan permukiman Kumuh 17. Program Peningkatan Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)						
Pemerataan pembangunan berbasis gender	Indek Pembagunan Gender (IPG)	1. Program Pengarusutamaan gender dan	97,1%	95,54	98,39	829,170,615	294,277,104	35,49

dan ramah anak		1. Pemberdayaan Perempuan 2. Program Perlindungan Perempuan 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga						
	Persentase Indikator Kota Layak Anak yang Dipenuhi	1. Program Penuhan Hak Anak (PHA) 2. Program Perlindungan Khusus Anak	65%	78,8	121,233	1,001,482,821	714,604,350	71.35



PEMERINTAH
KOTA BANDA ACEH

BAB IV PENUTUP



BerAKHLAK
Berencana, Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaborasi

bangga
melayani
bangsa

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Walikota berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan pada Tahun 2022 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2022 dan capaian sasaran strategis tahun-tahun sebelumnya.

Capaian Sasaran Strategis menunjukkan perubahan yang signifikan, berdasarkan pengukuran terhadap 7 (tujuh) sasaran strategis menunjukkan 3 (tiga) sasaran strategis dengan kategori “Sangat Baik”, 3 (tiga) sasaran strategis dengan kategori “Baik” dan 1 (satu) sasaran strategis dengan kategori “Cukup”.

Dari pengukuran terhadap 7 (tujuh) Misi, 7 (tujuh) sasaran dan 10 (sepuluh) indikator secara ringkas tersaji pada tabel 4.1:

Tabel 4.1
Rekapitulasi Capaian Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	(% Capaian 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2022)	(% Capaian RPJMD 2022	Kategori Capaian
				Target	Realisasi	(%) Capaian			
Misi 1 Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Penguatan Aqidah, Syariah dan Akhlak									
Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam	Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh	Indeks	95,96	85	79,85	93,94	85	93,94	Baik
Rata-Rata Capaian Sasaran 1							93,94	Baik	
Misi 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga									
Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	%	108,06	80	83,21	104,06	80	104,06	Sangat Baik
Rata-Rata Capaian Sasaran 2							104,06	Sangat Baik	
Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat									
Peningkatan	Angka kemiskinan	Jiwa	87,60	18,263	19,900	91,04	18,263	91,04	Baik

kesejahteraan masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	68,01	5,68	8,62	48,24	5,68	48,24	Kurang
	Persentase Peningkatan Nilai investasi	%	107,73	100	59,36	59,36	100	59,36	Cukup
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 3							66,21	Cukup	
Misi 4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat									
Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	Indeks	102,50	0,90	0,81	90	0,90	90	Baik
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 4							90	Baik	
Misi 5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik									
Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	103,49	90	89,16	99,07	90	99,07	Baik
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 5							99,07	Baik	
Misi 6. Membangun Infrastruktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan									
Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	Indeks	112,88	63,40	71,00	112	63,40	112	Sangat Baik
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 6							112	Sangat Baik	
Misi 7. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	Indeks pembangunan Gender (IPG)	%	98,47	97,1	95,54	98,39	97,1	98,39	Baik
	Persentase Indikator Kota Layak anak yang dipenuhi	%	111,77	65	78,8	121,23	65	121,23	Sangat Baik
Rata-Rata Total Capaian Sasaran 7							109,81	Sangat Baik	
Jumlah Nilai Rata-Rata Capaian							96,44	Baik	

Banda Aceh, Maret 2023 M
Ramadhan 1444 H

PJ. WALIKOTA BANDA ACEH



H. BAKRI SIDDIQ, SE. M.Si

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Misi 1. Meningkatkan Pelaksanaan Syariah Islam dalam Bidang Penguatan Aqidah, Syariah dan Akhlak				
1	Terwujudnya nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariah Islam	1.1 Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh	85%
Misi 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga				
2	Mewujudkan pendidikan Kota Banda Aceh yang bermutu, berdaya saing, berkarakter Islami dan berprestasi	Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan	2.1 Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah	80%
Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat				
3	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	3.1 Angka Kemiskinan	18,263 jiwa
			3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	5,68%
			3.3 Persentase Peningkatan Nilai Investasi	100%
Misi 4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat				
4	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat	4.1 Persentase Indikator Kota Sehat yang terpenuhi	0,9
Misi 5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah, Demokrasi	5.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%
Misi 6. Membangun Infrastruktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan				
6	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni	6.1 Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni	63,40%
Misi 7. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
7	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk	Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak	7.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	97,1%
			7.2 Persentase Indikator Kota Layak Anak yang terpenuhi	65%

WALIKOTA BANDA ACEH


H. AMINULLAH USMAN, SE. Ak, MM

**PENGHARGAAN YANG DITERIMA
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2022**



Pemerintah Kota Banda Aceh menerima Penghargaan Kota layak anak Tahun 2022



Pemerintah Kota Banda Aceh menerima Penghargaan sebagai Pelopor Kota layak Anak Tahun 2022



Pemerintah Kota Banda Aceh menerima penghargaan tingkat vaksinasi PMK terbaik Tahun 2022



Pemerintah Kota Banda Aceh menerima penghargaan Pelayanan Publik Terbaik dari Ombudsman RI Tahun 2022





Pemerintah Kota Banda Aceh menerima penghargaan Wajat Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI Tahun 2022



Pemerintah Kota Banda Aceh menerima penghargaan proklamasi dari Kementerian LHK Tahun 2022



Pemerintah Kota Banda Aceh menerima penghargaan Juara pertama API Award Tahun 2022

